



**JAWABAN TERTULIS ATAS PERTANYAAN KOMISI IV DPR RI
PADA RAPAT KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN
KOMISI IV DPR RI
23 AGUSTUS 2021**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAKARTA, AGUSTUS 2021**

1. Bapak Ir. H. T.A. Khalid, M.M (Fraksi Partai Gerindra, Aceh II)

a. **Pertanyaan :**

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020, KKP mendapatkan opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kami Fraksi Partai Gerindra menilai dan mengharapkan kepada Menteri KKP agar segera menggenjot sekuat tenaga realisasi riil anggaran berupa program program strategis KKP kepada nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, UMKM Sektor KP, dan masyarakat pesisir agar terberdayakan secara signifikan, sehingga KKP mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2021 ini.

Tanggapan :

Terhadap Opini LK KKP Tahun 2020 yang mendapatkan WDP, melalui jajaran Itjen KKP mengawal mitra Inspektorat Jenderal KKP yaitu unit Eselon I KKP untuk segera menindaklanjuti perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan BPK RI. Termasuk terkait dengan upaya merealisasikan program-program strategis KKP yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelautan dan perikanan, antara lain dengan mengawal dan mengawasi pelaksanaannya oleh unit Eselon I KKP dengan menyusun *timeline* dari setiap penyelesaian kegiatan/program yang telah direncanakan. Bentuk pengawasan bisa berupa audit, evaluasi, reviu maupun pemantauan atas program dan kegiatan tersebut agar sejalan dengan target yang ditetapkan dan telah menjadi program Itjen KKP yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021.

b. **Pertanyaan :**

Masih terkait opini BPK yaitu WDP kepada KKP tahun 2020, hemat kami KKP dapat membantu nelayan, pembudidaya ikan, tambak, petani garam, UMKM sektor KP melalui jalur KUR yang bisa menyentuh langsung untuk membangkitkan ekonomi masyarakat KP. Oleh karena itu kami Fraksi Gerindra meminta kepada Menteri KP untuk melaporkan progress realisasi pengucuran KUR di LPMUKP tahun 2021, Untuk diketahui sebagai contoh laporan yang kami terima terkait KUR di Provinsi Aceh masih sangat sulit masyarakat untuk mendapatkan KUR walau sudah di verifikasi oleh pendamping KP dan menurut pendamping KP usulan tersebut sudah layak mendapatkan bantuan KUR dari KKP tetapi tidak mendapatkan kejelasan sampai dengan saat ini.

Tanggapan :

KKP terus melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan progress dari realisasi pengucuran KUR di LPMUKP ke masyarakat dan meminta laporan berkala dari LPMUKP atas pelaksanaannya. Pengawasan atas realisasi KUR ini telah diagendakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen KKP.

c. Pertanyaan :

Terkait refocusing anggaran KKP 2021 mencapai 1.6 triliun atau mencapai 25% dari total pagu anggaran KKP, kami menilai hal ini mengganggu pertumbuhan pendapatan nelayan, kami Fraksi Gerindra meminta Menteri KKP untuk menjelaskan dengan cermat progress capaian program strategisnya terkait pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, UMKM dan masyarakat pesisir yang diakibatkan oleh *impact refocusing*?

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak Ir. H. T.A. Khalid, M.M. Terkait dengan pemotongan anggaran KKP yang mencapai 25% dari total pagu KKP, dapat kami sampaikan bahwa hal ini sangat disayangkan mengingat KKP merupakan Kementerian teknis yang program dan kebijakannya menyentuh langsung dengan masyarakat kecil seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dll.

Dengan alokasi pemotongan anggaran yang begitu besar, tentu bukan hal yang mudah untuk menyisir alokasi anggaran yang dapat dipotong karena sebagian besar alokasi anggaran yang juga merupakan belanja gaji pegawai dan belanja operasional perkantoran yang tidak masuk dalam kriteria anggaran yang dapat dipotong. Kami telah berusaha dengan maksimal untuk menyisir setiap lini anggaran agar sebisa mungkin tidak memotong kegiatan dan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun demikian, karena besarnya pemotongan anggaran, tidak dapat kami pungkiri beberapa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga terkena imbasnya.

Kami akan berupaya agar pemotongan anggaran ini tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan nelayan. Karena disisi lain, masyarakat nelayan juga merupakan subjek dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sumber alokasi anggarannya juga berasal dari pemotongan anggaran ini.

d. Pertanyaan :

Berdasarkan laporan Realisasi Penyerapan Anggaran KKP Tahun 2021 per 19 Agustus Tahun 2021 bahwa realisasi anggaran rata-rata 56,36 persen. Menurut kami Fraksi Partai Gerindra hal ini capaian biasa karena terjadi refocusing sebanyak 25%, kedepan kami harap program – program yang bersifat padat karya masyarakat jangan lagi menjadi korban refocusing di KKP, percepatan penyerapan anggaran perlu di genjot yang signifikan, supaya selaras dengan slogan HUT RI ke-76 yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh

Tanggapan :

Terimakasih atas masukan Bapak, kami pun setuju atas masukan yang diberikan. Tahun 2021 KKP mengalami refocusing dan realokasi sampai dengan tahap 4 sehingga pagu saat ini menjadi Rp 4,75 T. Refocusing dan realokasi ini begitu berdampak pada program – program KKP. Namun, KKP tetap berkomitmen mempertahankan program – program KKP yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat KP, seperti: bantuan alat

penangkapan ikan, kapal perikanan, bakti nelayan, kegiatan dan pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, bantuan sarpras perikanan budidaya, pengawasan SDKP, kampanye gemarikan, sarpras pengolahan dan pemasaran, rehab kawasan mangrove, pengembangan usaha garam rakyat, sarpras niaga garam rakyat serta pelatihan dan penyuluhan masyarakat KP.

e. Pertanyaan :

Diketahui, KKP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6.122 triliun yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 2,6 triliun dan Belanja Non Operasional Rp 3,5 triliun. Di sisi lain, KKP juga mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8,043 triliun. Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya mendukung penambahan pagu indikatif KKP yang akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, terutama kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat padat karya karena Indonesia dalam kondisi pandemic covid-19 kegiatan – kegiatan yang bersifat padat karya sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat nelayan Indonesia, begitu juga mempercepat realisasi anggaran dalam keadaan pandemi yang serba sulit ini.

Tanggapan :

Terimakasih atas dukungan Bapak terhadap usulan anggaran KKP tahun 2022 karena didorong masih banyaknya peran strategis KKP yang belum tertampung dalam pagu anggaran tahun 2022, maka KKP mengajukan tambahan pagu anggaran yang kedepannya diperuntukan untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu dalam hal ini kami mohon dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI.

f. Pertanyaan :

Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan konkrit kepada KKP terutama Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya terkait dampak refocusing anggaran terhadap program-program berkaitan dengan bantuan masyarakat, bahkan ada kegiatan kegiatan yang sudah dikeluarkan CPCL seperti kegiatan bioflok, dan kegiatan kegiatan lain ternyata tiba-tiba terkena refocusing. Hal ini menyebabkan banyak konstituen kami yang berprofesi pembudidaya dan nelayan sangat kecewa.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak Ir. H. T.A. Khalid, M.M. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dengan alokasi pemotongan anggaran yang begitu besar, tentu bukan hal yang mudah untuk menyisir alokasi anggaran yang dapat dipotong karena sebagian besar alokasi anggaran yang juga merupakan belanja gaji pegawai dan belanja operasional perkantoran yang tidak masuk dalam kriteria anggaran yang dapat dipotong. Kami telah berusaha dengan maksimal untuk menyisir setiap lini anggaran agar sebisa mungkin tidak memotong kegiatan dan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun demikian, karena besarnya pemotongan anggaran, tidak dapat kami pungkiri beberapa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga terkena imbasnya. Namun demikian, kami

masih dapat menjalankan beberapa kegiatan bantuan masyarakat diantaranya, bantuan alat penangkapan ikan dan bakti nelayan. Selain itu, beberapa kegiatan pelatihan/bimtek juga tetap dapat dilaksanakan.

Selain itu, Ditjen Perikanan Budidaya tetap menyalurkan BP aspirasi sesuai dengan usulan atau proposal yang telah masuk kepada Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu untuk benih, induk dan pakan. Untuk Bioflok, akan disalurkan untuk prioritas yang menjadi usulan di tahun 2021. Sedangkan pemenuhan bioflok yang merupakan penundaan tahun 2020, akan direalisasikan pada tahun 2022, dengan prioritas data CPCL yang sdh masuk ke Ditjen Perikanan Budidaya. Kami mohon maaf dengan kondisi ini dan kami akan merealisasikan bioflok ini mulai awal tahun 2022, dengan mulai memasukkan BP Bioflok ini kedalam ekatalog, sehingga dapat segera didistribusikan ke pembudidaya penerima.

g. Pertanyaan :

Kelebihan tangkapan ikan dipelabuhan selama pandemi kelancaran distribusi hasil perikanan covid-19 tidak terdistribusi dengan baik. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta KKP untuk segera mencari format penyelesaiannya supaya masyarakat nelayan tidak dirugikan.

Tanggapan :

Ditjen Perikanan Tangkap selalu berkoordinasi dengan Ditjen PDSPKP untuk mengoptimalkan proses distribusi hasil produksi perikanan di pelabuhan perikanan. Ditjen PDSPKP melakukan beberapa langkah baik melalui fasilitasi kendaraan distribusi ikan berpendingin serta membuat sticker “kendaraan pengangkut ikan” termasuk surat kepada para pihak terkait untuk membantu kelancaran distribusi ikan. Melalui hal dimaksud diharapkan pasokan ikan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri dapat berjalan lancar. Namun demikian dapat disampaikan bahwa secara umum pada masa pandemi di tahun 2021 ini, penyerapan hasil produksi perikanan masih tergolong lebih baik, apabila dibandingkan pada masa awal-awal pandemi tahun 2020. Permintaan ekspor sudah tergolong normal, begitupun permintaan lokal tidak lagi terhambat oleh kebijakan PPKM skala lokal di daerah.

h. Pertanyaan :

Seperti kita ketahui, Indonesia mencatatkan nilai ekspor ikan hias mencapai USD 9,2 juta pada kurun waktu Januari-Maret 2021. Capaian ini menjadi yang paling besar dibanding empat tahun terakhir pada periode yang sama. Untuk mendukung hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra meminta KKP khususnya Ditjen PB, untuk lebih serius mendorong sektor usaha produksi budidaya ikan hias melalui peningkatan peran penyuluh dalam melakukan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis hingga akses pemasaran kepada pembudidaya guna meningkatkan *income* pembudidaya serta pengembangan budidaya ikan hias.

Tanggapan :

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama unit kerja terkait terus berupaya mengembangkan budidaya ikan hias, karena karakteristik usaha yang dapat melibatkan banyak masyarakat pembudidaya ikan. Kami sangat setuju dan catatan Bapak bahwa tantangan terbesar budidaya ikan hias adalah pada pemasaran dan akses pasar untuk itu kami akan terus berkoordinasi dengan Ditjen PDS. Terkait teknologi budidaya ikan hias sudah tersedia cukup beragam baik di UPT Ditjen. Perikanan Budidaya maupun di UPT BRSDMKP baik untuk budidaya ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut. Untuk pendampingan dan bimbingan teknis serta penyeberluasan teknologi budidaya, kami akan berkoordinasi dengan Pusat Penyuluhan – BRSDMKP dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Ditengah-tengah keterbatasan alokasi anggaran, BRSDM senantiasa terus fokus memberikan layanan peningkatan kompetensi bagi masyarakat di bidang budidaya. BRSDM melalui Puslatluh telah melatih masyarakat pembudidaya ikan sebanyak 2.971 orang ditahun 2020 dan selama semester I tahun 2021 sebanyak 1.567 orang dengan target pelatihan peserta dapat meningkatkan pendapatannya. Untuk tahun 2021 telah dilakukan pelatihan ikan hias online yaitu ikan komet di P2MKP Mekar Jaya oleh BPPP Medan dengan jumlah peserta sebanyak 98 orang.

Sedangkan, untuk kegiatan pendampingan (penyuluhan) telah dilakukan pendampingan kepada 47.754 kelompok ditahun 2020 dengan target pendampingan kepada kelompok yang mampu meningkatkan skala usahanya dan mendapatkan akses pemasaran.

Dalam melakukan pendampingan pelatihan dan penyuluhan bagi pembudidaya ikan hias, para instruktur dan penyuluh menyampaikan iptek hasil riset BRSDM dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH). Riset berfokus pada domestikasi ikan hias lokal yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan pangsa ekspor. Hal ini karena Indonesia memiliki kekayaan hayati ikan hias dan dikenal sebagai negara produsen dunia. Di dunia bisnis ikan hias, produk Indonesia dikenal memiliki banyak spesies, baik ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut. Dari 1.100 spesies ikan hias air tawar yang ada di dunia, 400 spesies di antaranya berasal dari Indonesia.

Ikan Arwana Super Red, Tigerfish, dan Rasbora merupakan contoh ikan hias asli Indonesia yang bernilai ekonomis, oleh karenanya BRBIH terus berupaya mengembangkan teknologi budidayanya selain juga karena alasan pelestarian untuk mengurangi produksi dari hasil tangkapan. BRBIH telah menguasai teknologi budidaya ikan hias Arwana super red, Botia, Balasak dan Ringau. Teknologi budidaya ikan hias Botia dan Balasak sudah dikuasai mulai dari teknologi reproduksinya sampai teknologi pemeliharaan ukuran siap jual, seperti ikan hias Botia sampai ukuran 4-5cm. Sementara teknologi ikan hias Arwana super red dan Ringau sudah dikuasai teknologi pemeliharaan benih dengan teknologi recirculating aquaculture system (RAS).

Selain itu untuk meningkatkan kualitas ikan hias untuk nilai jual yang lebih ekonomis, telah dikembangkan teknologi pakan formulasi berbahan baku magot, inovasi produk suplemen pakan SUPERGOLD penambah kualitas

warna ikan hias, ASHANTI Feed, untuk warna ikan lebih jingga, pekat dan cerah serta Dr. O Fish berupa kit deteksi karoteniod pada pakan ikan hias.

i. Pertanyaan :

Pada periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 1,27 miliar USD atau naik 14 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Namun, pelaku eksportir produk perikanan Indonesia kerap kali menerima penolakan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Untuk mengantisipasi hal serupa, Fraksi Partai Gerindra meminta KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) untuk terus menjaga dan meningkatkan eksistensi bisnis produksi oleh para pelaku usaha pengolahan ikan dalam menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan agar ekspor perikanan kita mampu bersaing dengan produk perikanan negara lain di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia.

Tanggapan :

Ditjen PDSPKP berkomitmen akan senantiasa melakukan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan teknis kepada para pelaku usaha pengolahan ikan dalam menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerepan sistem jaminan mutu yang harmonis selama pandemi Covid 19 antara pusat dan daerah termasuk juga dengan ketentuan negara importir melalui berbagai upaya dan terobosan, salah satunya adalah penerapan logo *GMP Certified* (dahulu SKP) guna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai produk, penerapan *remote assessment* untuk mempercepat layanan SKP bagi pelaku usaha dan lain sebagainya.

j. Pertanyaan :

Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus Covid-19 tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan detail KKP terkait negara mana saja, dan alasan apa, serta produk perikanan apa saja yang ditolak? Sebab, China merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia dari segi volume yang mencapai lebih dari 400.000 ton. Selain AS sebagai negara dengan nilai ekspor kedua produk perikanan kita.

Tanggapan :

Dapat kami sampaikan bahwa penanganan kasus kontaminasi jejak Covid-19 pada hasil perikanan Indonesia yang diekspor ke negara RRT adalah sebagai berikut:

1. Pihak *General Administration of Customs of The People's Republic of China* (GACC) telah menyampaikan temuan kontaminasi jejak virus Covid-19 pada hasil perikanan Indonesia yang diekspor ke China sejak kasus pertama tanggal 17 September 2020 hingga tanggal 19 Agustus 2021, yakni 42 kasus (tahun 2020 sebanyak 6 kasus, dan tahun 2021 hingga saat ini

- tercatat sebanyak 36 kasus) yang berasal dari hasil perikanan yang diekspor oleh 26 UPI dari Indonesia.
2. Setiap notifikasi kasus kontaminasi jejak virus Covid-19, pihak GACC akan melakukan pemeriksaan secara virtual (*video inspection*). Sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, dari 26 UPI, pihak GACC telah melakukan video inspection terhadap 22 UPI dan 4 UPI sudah dijadwalkan untuk dilakukan inspeksi secara virtual.
 3. Mengacu pada daftar terakhir UPI Indonesia pada website GACC (*The approved list of Indonesia aquatic products establishments in China*) yang terbit pada tanggal 12 Agustus 2021 dari 26 UPI terdapat 10 UPI yang masih dapat melakukan ekspor, dan 16 UPI ditangguhkan eksportnya ke China.
 4. Penangguhan ekspor terhadap 16 UPI tersebut didasarkan atas:
 - Terjadinya kasus temuan kontaminasi jejak Covid-19 yang berulang dari UPI dimaksud.
 - Hasil *video inspection* dari GACC dan dari hasil audit, pengujian Covid-19 terhadap karyawan oleh beberapa perusahaan masih minim.
 5. Pertemuan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten (BKIPM-KKP) dalam menangani kasus kontaminasi jejak Covid-19 pada hasil perikanan Indonesia yang dikirim ke China:
 - a. Pertemuan bilateral antara BKIPM dan GACC yang difasilitasi oleh KBRI-Beijing sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali. Pertemuan bilateral terakhir telah dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021, dengan hasil sebagai berikut:
 - GACC menganggap terjadinya temuan kontaminasi jejak covid-19 berulang disebabkan oleh belum maksimalnya penerapan protokol Covid pada sektor hulu-hilir (sektor nelayan, pembudidaya dan supplier).
 - Pihak GACC juga mengidentifikasi berdasarkan *video inspection* bahwa pekerja di UPI belum memahami terkait penerapan protokol kesehatan di UPI.
 - BKIPM akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 533 UPI yang mempunyai nomor registrasi ekspor ke RRT serta 94 UPI yang sedang diusulkan pendaftarannya ke RRT.
 - Kebijakan GACC terkait persyaratan pengendalian virus Covid-19 dan *suspend* UPI akan dievaluasi bila Indonesia dapat mengendalikan penyebaran virus Covid-19 secara paripurna
 - b. Pertemuan koordinasi dengan K/L terkait antara lain dengan Kemenkomarves, Kemenlu, Kemendag, Kementan, KBRI-Beijing dan KJRI di beberapa wilayah di China. Pertemuan antara K/L terakhir telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, dengan hasil sebagai berikut:
 - Indonesia perlu memperbaiki Sistem Jaminan Mutu dan KHP dari hulu ke hilir
 - Perlu dilakukan pelatihan bersama antara GACC dan BKIPM-KKP terkait dengan manajemen laboratorium.
 - Pelaksanaan vaksin bagi personil yang terlibat dari hulu ke hilir
 6. Pencegahan kontaminasi jejak Covid-19 yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pengawasan rutin terhadap penerapan protokol kesehatan dan uji Covid-19 pada pekerja yang terkait dengan rantai pasok hulu-hilir.
 - Pembentukan tim satgas

- Menerapkan manajemen kesehatan personil antara lain uji Covid-19 pada seluruh personil yang menangani dan mengolah ikan secara periodik.
 - Melaksanakan program vaksinasi untuk setiap pekerja
 - Melakukan proses desinfeksi terhadap sarana-prasarana serta bahan kemasan
 - BKIPM-KKP tetap berkomitmen untuk melakukan pengendalian terhadap UPI dengan melakukan *official control* dan pengawasan secara rutin untuk memastikan penerapan protokol Covid-19 dan jaminan keamanan hasil perikanan selama proses pengolahan di UPI.
 - BKIPM-KKP terus berupaya meningkatkan kewaspadaan selama pandemi Covid-19 dengan pengujian pada sampel produk, serta membenahi rantai hulu-hilir perikanan yang diekspor.
7. Berdasarkan hubungan kerjasama bilateral (MoU/MRA) antara BKIPM-KKP dan GACC dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka:
- Sebagai salah satu pemenuhan persyaratan ekspor ke China dalam masa pandemi, maka setiap ekspor hasil perikanan Indonesia ke China harus dilengkapi dengan hasil uji bebas Covid-19.
 - Hasil perikanan Indonesia yang dinotifikasi terkena kontaminasi jejak Covid-19, tidak dilakukan pemusnahan di China, tetapi dikembalikan ke Indonesia untuk dilakukan treatment (penanganan / pengolahan) kembali.
 - Hasil perikanan yang kembali ke Indonesia yang kemudian akan diekspor kembali, tidak diijinkan diekspor kembali ke China akan tetapi di ekspor ke negara lain.

k. Pertanyaan :

Fraksi Partai Gerindra mengingatkan KKP pada usulan DAK tahun 2022 benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Mengingat, hal ini penting untuk menyerap produksi petambak garam kita dalam memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan garam industri dalam negeri. Dikarenakan masih tingginya ketergantungan kita terhadap garam impor. Fraksi Partai Gerindra juga menekankan KKP untuk serius memacu produksi garam rakyat khususnya meningkatkan kadar Natrium Klorida (NaCl) menjadi 94 – 97 persen sesuai kebutuhan garam rumah tangga dan industri nasional dengan menambah lokasi *washing plant*, terutama di daerah yang memiliki potensi garam.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) menggunakan 4 (empat) pendekatan: (1) produktivitas, yakni jumlah garam yang dihasilkan per luasan lahan; (2) kualitas, terkait dengan kandungan NaCl atau mineral lainnya; (3) kontinuitas, sebagai jaminan pasokan garam; dan (4) korporatisasi, yang berarti pola usaha yang bergerak dalam wadah kelembagaan usaha dan menerapkan budaya korporasi. Sejak tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program PUGaR telah melakukan kegiatan integrasi lahan,

pembangunan/revitalisasi gudang penyimpanan garam, peningkatan jalan produksi/saluran irigasi tersier, penyaluran sarana produksi (antara lain geomembrane dan rumah tunnel), dan pelatihan peningkatan kapasitas petambak garam.

Upaya peningkatan sisi hulu dilanjutkan dengan sisi hilirnya, melalui peningkatan nilai (*value*) produk garam yang berorientasi pasar. Peningkatan kualitas garam (kandungan NaCl) dapat dilakukan pada tahap produksi serta pasca produksi. Jika peningkatan kualitas garam di tahap produksi dilakukan melalui integrasi lahan garam dan penggunaan alat pemurnian garam metode elektrolisis, maka pada tahap pasca produksi, KKP membangun *washing plant* (pabrik pencucian atau pemurnian) garam yang mengolah garam bahan baku menjadi garam konsumsi beriodium atau garam industri.

Pada dasarnya, Indonesia telah mencapai swasembada garam konsumsi yang kebutuhannya sekitar 650.000 ton/tahun. Sedangkan untuk industri, garam lokal telah digunakan untuk industri pakan ternak, penyamakan kulit, serta pengasinan ikan. Ke depan, KKP akan mendorong penggunaan garam lokal sebagai bahan baku industri farmasi dan industri aneka pangan yang saat ini masih impor. Kebutuhannya per tahun adalah sekitar 5.000 dan 612.000 ton.

I. Pertanyaan :

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan ikan di seluruh daerah masih menjadi permasalahan besar. Sebagai contoh dangkalnya beberapa muara pelabuhan ikan khususnya di Provinsi Aceh, yang menyebabkan nelayan sulit untuk melaut. Tetapi dalam RKA/KL KKP tahun 2022 belum terlihat, Fraksi Partai Gerindra meminta Bapak Menteri KKP untuk menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari skala prioritas rencana kerja pada satker Ditjen Perikanan Tangkap sebagai upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tanggapan :

Sampai dengan saat ini, DJPT telah mengidentifikasi berbagai rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional, termasuk kebutuhan penanganan pendangkalan di beberapa pelabuhan perikanan di Provinsi Aceh. Pada dokumen perencanaan kami, teridentifikasi bahwa terdapat 6 pelabuhan perikanan di Provinsi Aceh yang membutuhkan penanganan pendangkalan, yaitu PP Kutaraja, PP Idi, PP Labuhanhaji, PP Pusong, PP Anak Laut, dan PP Jangka.

Pengembangan pelabuhan perikanan menjadi salah satu kegiatan prioritas utama KKP pada rencana pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024. Namun demikian mengingat situasi pandemi yang ternyata masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka hal tersebut berimplikasi pada postur penganggaran yang sangat ketat, termasuk untuk perencanaan tahun 2022. Saat ini DJPT masih melakukan exercise untuk menentukan lokasi-lokasi prioritas pengembangan sehingga dalam hal ini masih terbuka peluang untuk berbagai pengembangan di lokasi Provinsi Aceh.

Selain itu, dengan terbatasnya alokasi anggaran APBN KKP di Pusat, kami juga mendorong pembangunan pelabuhan perikanan dapat dibiayai melalui alokasi anggaran transfer daerah seperti DAK. Pada usulan DAK 2022, kami telah mengusulkan agar setidaknya ada 4 pelabuhan perikanan di Provinsi Aceh dapat dibiayai pembangunannya. Namun demikian, hal ini perlu kerja sama yang solid dari pemerintah daerah provinsi (Dinas KP Provinsi Aceh) untuk segera menyiapkan perencanaan dan data dukung usulan agar pada saat pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, usulan telah lengkap dan dapat diakomodir untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

m. Pertanyaan :

Fraksi Partai Gerindra prihatin dengan masih maraknya kasus penyelundupan Benih Benur Lobster (BBL) yang kerap menggunakan jalur perairan. Dan diketahui kasus terbaru ribuan Lobster jenis mutiara senilai Rp11 miliar diamankan oleh aparat Kepolisian unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang melalui jalur-jalur baru di sekitar wilayah Palembang. Hal ini menandakan masih lemahnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia, kami meminta komitmen KKP untuk terus memperketat pengawasan serta penjagaan di wilayah perairan Indonesia khususnya di setiap pintu atau jalur pelintasan komoditas perikanan dari dan ke Indonesia, di samping meningkatkan pengawasan pada jalur pelabuhan, bandara hingga perbatasan laut.

Tanggapan :

KKP berkomitmen dalam pengelolaan lobster dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Dalam hal pengawasan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi benih bening lobster di luar instalasi karantina ikan dilakukan oleh petugas pengawas perikanan dan pengawasan komoditas benih bening lobster di instalasi karantina ikan dan/atau tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan petugas dari BKIPM.

KKP tetap berkomitmen untuk memberantas dan mengurangi praktik penyelundupan BBL, salah satu solusinya adalah selain melalui penegakkan hukum yang tegas, membangun K3 dengan instansi terkait, adalah melalui kegiatan preventif melalui sosialisasi dan penyebaran informasi kepada nelayan, masyarakat, serta pengguna jasa agar tidak melakukan kegiatan illegal tersebut.

KKP juga telah melakukan upaya-upaya peningkatan percepatan budidaya lobster di sentra-sentra penangkapan lobster guna memutus jalur pemasaran hasil tangkapan lobster ke pengepul, serta mengembangkan dan meningkatkan riset terkait cara pembudidayaan lobster yang baik dalam rangka meningkatkan produksi lobster hasil budidaya.

Bahwa BKIPM telah melaksanakan langkah tindak lanjut sbb.

1. Peningkatan pengawasan, analisis dan mitigasi risiko di tempat-tempat rawan penyelundupan.
2. Pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Penyelundupan BBL bersama Bareskrim Polri.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana bersama antar APH instansi terkait.
4. Integrasi data dan informasi antar APH Instansi terkait.
5. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan/bimtek.

2. Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari DESS, M.Sc (Fraksi Partai Gerindra – Jabar III

Pertanyaan :

Mengingatkan kembali pada rapat sebelumnya, ada 7 direktorat jenderal yang kami kritisi tetapi belum ada yang turun timnya untuk mengevaluasi apa yang dikemukakan, diantaranya tentang kepemilikan tanah oleh TNI.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari DESS, M.Sc. Terkait dengan status lahan/kepemilikan tanah oleh TNI, perlu proaktif dari pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berkenaan dengan sertifikasi tanah nelayan (tanah yang dimiliki oleh nelayan secara sah namun belum ada sertifikatnya) kami melaksanakan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan), dan kami terus berkoordinasi dengan BPN untuk akselerasi pelaksanaannya agar nelayan di daerah dapat segera mendapatkan sertifikat atas tanah yang dimilikinya.

3. Bapak DR. H. Suhardi Duka, M.M (Fraksi Partai Demokrat – Sulbar)

a. Pertanyaan :

Th 2020 WDP turun dari tahun 2019 yang mendapatkan predikat WTP. Mohon penjelasan pada hal mana yang tidak mendapat penilaian dr BPK, ada transaksi yang disclaimer, transaksi yang mana sehingga tidak WTP.

Tanggapan :

Temuan BPK yang menjadikan KKP mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan LK KKP Tahun 2020 yaitu:

- a. Temuan terhadap Kebijakan perizinan pelaksanaan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2020 yang diterbitkan mendahului aturan untuk pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea keluar atas transaksi ekspor BBL yang mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kehilangan potensi PNBP dari transaksi ekspor BBL tersebut:
- b. Temuan terhadap Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengandung kelemahan sehingga terdapat permasalahan dalam pengelolaan kas pada BLU LPMUKP serta pengelolaan pendapatan dan belanja BLU yang kurang tertib bukti pertanggungjawabannya; serta

- c. Temuan terhadap PNBPN dari pendapatan Jasa Pelabuhan dan Perikanan tidak dapat diyakini kewajarannya karena pendapatan tersebut hanya dicatat hanya berdasarkan estimasi pendapatan selama setahun.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Itjen KKP telah berkoordinasi dengan jajaran Eselon I lingkup KKP lainnya untuk segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan tersebut sesuai rekomendasi dari BPK RI.

b. Pertanyaan :

Realisasi 2021 baru 64,56% ini perlu perhatian, jangan trus menyiapkan silpa yang begitu besar, di lain sisi KKP meminta untuk tambahan anggaran sehingga hal ini tidak sinkron. Seharusnya bisa dibelanjakan di 2021 ini sampai dengan 98%.

Tanggapan :

KKP tetap optimis untuk merealisasikan anggaran yang telah diberikan ke KKP tahun ini. Adapun langkah – langkah percepatan yang akan dilakukan, antara lain: mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, lalu melakukan inventarisasi kegiatan – kegiatan yang sekiranya dapat dipercepat pelaksanaannya dan mudah untuk dilaksanakan, membuat timeline dan tetap berkomitmen pada timeline yang telah dibuat dari kegiatan – kegiatan prioritas, meningkatkan peran pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas dan melaksanakan monev secara berkala.

c. Pertanyaan :

Hasil kesepakatan Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran bahwa yang difocusing yaitu perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja operasional dan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami lihat anggaran di KKP yang di refocusing kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, tidak sesuai dengan standar yang dibuat Kementerian Keuangan. Perlu fokus dalam memperbaiki atau membuat refocusing anggaran. Terhadap kapal CPCL sudah siap, sampai sekarang kapal tidak ada, ini juga mungkin di refocusing atau hanyut kapalnya. Begitu juga excavator CPCL sudah siap tetapi sampai sekarang tidak ada.

Tanggapan :

Terima kasih atas Bapak DR. H. Suhardi Duka, M.M. Sebagaimana diketahui bersama bahwa refocusing anggaran dilakukan terhadap adalah kelompok kegiatan pendukung operasional seperti pertemuan, rapat dan perjalanan dinas serta kegiatan yang tidak mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (non PEN). Proporsi anggaran PEN dan non PEN di Ditjen Perikanan Budidaya pada saat dilakukan refocusing adalah 75% PEN dan 25 % non PEN, sehingga anggaran non PEN yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi nilai refocusing yang di bebaskan kepada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 388 Milyar atau sekitar 33 persen dari anggaran DJPB yang sebesar Rp. 1.170 Milyar. Sehingga

refocusing juga bersumber dari anggaran PEN dengan tetap memperhatikan program bantuan ke masyarakat, seperti Bioflok, benih dan induk, serta pakan mandiri dan juga excavator. Kami mohon maaf dengan kondisi ini dan kami akan menggunakan data CPCL excavator di 2021 yang belum terealisasi untuk direalisasikan di tahun 2022, tentunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan kegiatan bantuan kapal perikanan, dapat kami sampaikan bahwa kami telah mengalokasikan kegiatan pengadaan kapal perikanan sebanyak 13 unit di Dinas KP Provinsi Sulbar. Namun demikian, sampai dengan proses pemotongan anggaran, Dinas KP Provinsi Sulbar belum juga merealisasikan kegiatan dan menyatakan (bersurat resmi) tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Atas pertimbangan tersebut, alokasi kapal perikanan tahun 2021 di provinsi Sulbar masuk dalam skema pemotongan anggaran.

Kami mohon dukungan agar pada tahun 2022 terdapat penambahan anggaran sehingga pengalokasian bantuan kapal perikanan dapat lebih optimal baik dari sisi jumlah maupun dari sisi harga satuan per unit kapal sehingga spesifikasi kapal yang didapatkan dapat lebih optimal pula.

d. Pertanyaan :

Tahun 2022 pengadaan *speedboat* 124 unit dibandingkan dengan kapal nelayan 5 GT 65 unit. Kami melihat lebih besar kepentingan nelayan, *speedboat* ini banyak diparkir saja di Provinsi dan Kabupaten. Di lain sisi, nelayan kekurangan kapal. Kami minta anggaran *speedboat* dialihkan semua ke pengadaan kapal untuk nelayan.

Tanggapan :

Dalam bahan Raker yang disampaikan, anggaran sebesar Rp 119,8 Miliar yang dimaksudkan oleh Bapak Suhardi Duka merupakan alokasi anggaran untuk Perawatan Armada Pengawasan SDKP sebanyak 124 unit yang terdiri dari Kapal Pengawas sebanyak 30 Unit dan *Speedboat* Pengawasan sebanyak 94 Unit yang tersebar di seluruh UPT dan Satwas Ditjen PSDKP yang digunakan untuk pengawasan di kawasan konservasi perairan, untuk mengejar/memburu penyelundupan benih bening lobster yang masih marak.

Alokasi anggaran tersebut, digunakan untuk perawatan kapal meliputi perawatan rutin, perawatan darurat dan perawatan tahunan (*docking kapal*) dengan tujuan untuk mempersiapkan kondisi kapal pengawas dan *speedboat* siap operasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sehingga perawatan kapal pengawas dan *speed boat* ini sangat penting, karena untuk memastikan bahwa kapal pengawas dan *speed boat* pengawas siap operasi. Apabila dialihkan akan berpengaruh pada operasional kapal pengawas pada saat operasi pemberantasan illegal fishing.

e. Pertanyaan :

KKP perlu fokus untuk peningkatan produksi yang pertama ketersediaan SDM nelayan, kedua sarana penangkapan ikan dan budidaya ikan, seperti: kapal,

alat tangkap, bibit dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga perbaikan sistem pasar.

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan Bapak H. Suhardi Duka. Ketersediaan SDM khususnya nelayan, didukung BRSDM melalui kegiatan pelatihan yang telah menyentuh sebanyak 2.516 orang nelayan ditahun 2020 dan tahun 2021 semester I sebanyak 1.450 dengan kompetensi-kompetensi dibidang teknik penangkapan ikan, alat tangkap, dasar keselamatan dan sertifikasi bagi nelayan (BST, BST KLM, ANKAPIN dan ATKPAIN Tingkat II/III). Adapun terkait dengan kompetensi di bidang budidaya Puslatluh telah melatih masyarakat pembudidaya ikan sebanyak 2.971 orang ditahun 2020 dan tahun 2021 di semester I sebanyak 1.567 orang.

Sedangkan untuk kegiatan pendampingan (penyuluhan) selama Tahun 2020 telah dilakukan pendampingan kepada 47.754 kelompok yang terdiri atas:

1. KUB sebanyak 16.761 kelompok.
2. Pokdakan sebanyak 25.596 kelompok.
3. Poklasar sebanyak 4.967 kelompok.
4. Lain (Kugar, Pokmaswas) sebanyak 400 kelompok.

Ketersediaan SDM KP juga dipenuhi melalui kegiatan pendidikan. Sejak berdiri sampai dengan Tahun 2021, satuan Pendidikan KP di BRSDM berupa Politeknik KP dan SUPM telah meluluskan sekitar 50.973 Orang. Untuk tahun 2021 lulusan satuan pendidikan KP sebanyak 2.419 orang yang terdiri dari 1.184 Orang lulusan pendidikan tinggi dan 1.235 Orang lulusan pendidikan menengah. Dari Lulusan Tahun 2021 untuk Program Studi/Keahlian Penangkapan Ikan sebanyak 581 Orang, Program Studi/Keahlian Mesin Perikanan sebanyak 433 Orang, Program Studi/Keahlian Budidaya Perikanan sebanyak 588 Orang, Pengolahan Hasil Perikanan sebanyak 516 orang, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan sebanyak 67 orang, Penyuluhan Perikanan sebanyak 71 orang, Teknik Penanganan Patologi Ikan sebanyak 24 orang, Agribisnis Perikanan sebanyak 24 orang, Teknologi Kelautan sebanyak 67 orang, Ekowisata Bahari sebanyak 24 orang, dan Konservasi sebanyak 24 orang.

Dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan peningkatan teknologi yang efisien, efektif dan ramah lingkungan, serta penyediaan sarana budidaya dan pengaturan tata Kelola sistem budidaya ikan. Untuk menstimulasi perkembangan usaha pembudidaya ikan Ditjen. Perikanan Budidaya memberikan bantuan sarana budidaya kepada pembudidaya ikan. Mohon dukungan Bapak supaya kegiatan ini dapat ditingkatkan volumenya sehingga menjangkau masyarakat pembudidaya yang lebih luas.

Lalu terkait perbaikan sistem pasar, Ditjen PDSPKP dalam rancangan kerja tahun 2022 mengusulkan kegiatan yang terkait perluasan Akses Pasar dalam dan luar negeri serta pengelolaan Sistem Logistik Ikan.

f. Pertanyaan :

Masalah pergaraman terus menerus impor garam, kapan bisa mandiri? perlu langkah – langkah yang lebih fokus sehingga ketergantungan untuk impor garam atau lainnya seperti salmon jangan diberikan keleluasan yang begitu luas, di lain sisi mengurangi devisa kita.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan masukan Komisi IV DPR RI. Terkait dengan impor garam oleh industri-industri binaan Kementerian Perindustrian ditujukan untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri, yaitu industri CAP, aneka pangan, farmasi/kosmetik, dan pengeboran minyak. Keputusan impor garam dan kuotanya diputuskan dalam Rakortas di Kemenko Perekonomian, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga yang terkait, termasuk juga Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik.

Perbaikan ke depan:

1. Dengan terbitnya PP turunan CK, termasuk diantaranya PP 27 2021, maka penentuan impor garam dilakukan berdasarkan neraca komoditas. dengan demikian, tidak hanya pertumbuhan industri namun ketersediaan garam lokal merupakan variabel penting untuk menentukan volume impor garam. Keputusan dilakukan melalui rakortas antar K/L di Kemenko Perekonomian;
2. KKP sedang mengajukan izin prakarsa penyusunan RanPerpres Pembangunan Pergaraman Nasional yang didalamnya menggambarkan sinergi serta rencana aksi dari K/L terkait dan daerah (kabupaten dan provinsi).

Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan garam industri antara lain:

1. Kebutuhan garam industri terdapat di berbagai produk antara lain pakan ternak dan makanan minuman yang dipenuhi melalui pabrik pengolahan garam skala kecil yang telah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2020 namun perlu ditambahkan untuk dibangun di lokasi-lokasi sentra garam lainnya;
2. Terkait kebutuhan garam untuk industri Aneka Pangan dapat dipenuhi dengan melakukan industrialisasi garam nasional melalui peningkatan kualitas dan harga yang kompetitif.

g. Pertanyaan :

Kawasan rumput laut kami dorong, begitu juga DAK untuk Kab. perlu memperhatikan dapil supaya ada nilai kami untuk dapil kami.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan dan saran yang Bapak sampaikan, untuk optimalisasi pembangunan perikanan budidaya di daerah sentra produksi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mendorong optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus. Pada pemanfaatannya, Ditjen. Perikanan Budidaya mengarahkan daerah untuk memanfaatkan DAK dalam mengembangkan potensi masing-masing daerah,

diantaranya adalah daerah yang potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut.

4. Bapak H. Johan Rosihan, S.T (Fraksi PDIP – NTB I)

a. Pertanyaan :

Statement Pak Presiden dalam pidato kenegaraan bahwa pemerintah tetap mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan. Dilihat dari anggaran kelautan yang menggarap sektor pangan ini tidak lebih dari 1% dari anggaran APBN, apa yang dapat kita harapkan untuk pengembangan pangan dari sektor kelautan oleh karena itu saya mendukung apabila masih ada ruang karena ada potensi sumber daya yang kita miliki di kelautan kita itu yang butuh dukungan, anggaran 6T untuk menggarap potensi KP menurut saya tidak masuk akal.

Tanggapan :

Terima kasih atas dukungan Bapak H. Johan Rosihan, S.T, walaupun keterbatasan ini KKP juga tetap fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat KP melalui padat karya dan penguatan pangan.

b. Pertanyaan :

Mohon dijelaskan gambaran proporsional anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat. Apa saja? dan apa langkah – langkah untuk mencapai target?

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak H. Johan Rosihan, S.T, terhadap anggaran KKP yang menyentuh langsung ke masyarakat. Untuk pagu anggaran tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran KKP telah mengalami refocusing dan realokasi sampai dengan tahap IV sehingga pagu saat ini menjadi Rp 4,75 Triliun. Untuk proporsi anggaran yang menyentuh masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat KP melalui padat karya dan penguatan pangan sebesar Rp. 1,08 triliun terdiri dari

1. Program PEN - Ketahanan Pangan sebesar Rp. 891,87 miliar
(Kapal, alat tangkap, bantuan sarana budidaya perikanan, chest freezer gudang beku, pasar ikan, sentra kuliner, sarana niaga garam, sarpras wisata bahari, bantuan konservasi, pelatihan masyarakat, bulan mutu karantina).
2. Program PEN - Padat Karya sebesar Rp. 190,26 miliar
(Minapadi, kluster tambak udang, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif/PITAP, rehabilitasi mangrove, integrasi lahan garam, penanaman vegetasi pantai) .

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target antara lain (1) mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa, (2) mempercepat proses identifikasi dan penetapan calon penerima dan calon lokasi bantuan, (3) memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional, relevan dan terjadwal, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun, (4) melakukan monitoring dan evaluasi progres penyelesaian kegiatan.

c. Pertanyaan :

Kami melihat ketidakproporsional dalam penyusunan anggaran dari hulu ke hilir, perikanan tangkap 700 M dan untuk budidaya 1.1 T. Sementara di hilir peningkatan daya saing cuma 300 M, tidak heran kemudian daya saing ekspor kita dengan negara tetangga kalah walaupun volume ekspor kita tinggi tapi kalah daya saing. Tolong dibuat proporsional agar kita memiliki daya saing yang hebat dibandingkan negara - negara lain

Tanggapan :

Kami sepakat dengan Bapak Johan Rosihan terkait perlunya proporsionalitas alokasi anggaran antara kegiatan hulu dan hilir perikanan. Berkenaan dengan sistem bisnis perikanan yang sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan, maka proporsionalitas anggaran ini akan dapat membuat sektor hulu dan hilir berkerja secara optimal mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Peningkatan produksi hulu harus dibarengi dengan penguatan hilir mulai dari pasca panen/produksi hingga terus ke pasar. Melalui Ditjen PDS memiliki peran yang dapat menghela percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara terpadu diantaranya melalui penguatan sistem rantai dingin, penjaminan ketertelusurat, perbaikan pasca panen, pembinaan dan penerapan mutu pada kegiatan pengolahan hasil perikanan, *market intelligent* dan peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri, dan penyediaan permodalan usaha dan lain sebagainya.

d. Pertanyaan :

Perihal pergaraman, sampai kapan impor garam? Peran kita apa untuk membuat garam kita sama hasilnya dari garam – garam luar negeri yang kita impor. Agar kemudian anggaran kita fokus dan berikan gambaran untuk proporsional anggarannya.

Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan Komisi IV DPR RI. Terkait dengan impor garam oleh industri-industri binaan Kementerian Perindustrian ditujukan untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri, yaitu industri CAP, aneka pangan, farmasi/kosmetik, dan pengeboran minyak. Keputusan impor garam dan kuotanya diputuskan dalam Rakortas di Kemenko Perekonomian, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga yang terkait, termasuk juga Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik.

Perbaikan ke depan:

1. Dengan terbitnya PP turunan CK, termasuk diantaranya PP 27 2021, maka penentuan impor garam dilakukan berdasarkan neraca komoditas. dengan demikian, tidak hanya pertumbuhan industri namun ketersediaan garam lokal merupakan variabel penting untuk menentukan volume impor garam. Keputusan dilakukan melalui rakortas antar K/L di Kemenko Perekonomian;
2. KKP sedang mengajukan izin prakarsa penyusunan RanPerpres Pembangunan Pergaraman Nasional yang didalamnya menggambarkan sinergi serta rencana aksi dari K/L terkait dan daerah (kabupaten dan provinsi).

Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan garam industri antara lain:

- 1) Kebutuhan garam industri terdapat di berbagai produk antara lain pakan ternak dan makanan minuman yang dipenuhi melalui pabrik pengolahan garam skala kecil yang telah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2020 namun perlu ditambahkan untuk dibangun di lokasi-lokasi sentra garam lainnya;
- 2) Terkait kebutuhan garam untuk industri Aneka Pangan dapat dipenuhi dengan melakukan industrialisasi garam nasional melalui peningkatan kualitas dan harga yang kompetitif.

Fraksi Partai Nasional Demokrat

1. Pertanyaan :

Pertanggung jawaban anggaran 2020 Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 yang mencapai 91,27% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal yang paling memberikan kontribusi terhadap rendahnya serapan anggaran KKP tahun 2020 yaitu Ditjen Perikanan Tangkap 85,51% dan Ditjen Perikanan Budidaya 80,21%. Tentunya hal tersebut menjadi catatan dan evaluasi untuk memacu serapan anggaran tahun berjalan. Selain itu diperlukan upaya perbaikan pada permasalahan pelaporan keuangan yang menjadikan KKP hanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian dari BPK. Fraksi Partai NasDem berharap KKP memberi perhatian serius terkait hal tersebut.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan dan saran yang Bapak sampaikan, belajar dari pengalaman tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan evaluasi dan perbaikan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 dan anggaran bisa terserap. Dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mendapatkan opini terbaik dari BPK.

2. Pertanyaan :

Untuk realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2021 yang baru mencapai 64,58%, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk meningkatkan kinerja dengan segera merealisasikan kegiatan dan program dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan mengutamakan kegiatan padat karya yang akan memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi Masyarakat tentunya sangat membutuhkan stimulus melalui program-program dari pemerintah agar produktifitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi terkhusus bagi para pelaku di sektor kelautan dan perikanan.

Tanggapan :

KKP tetap berkomitmen segera merealisasikan program – program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat KP, terutama untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi. Kami selalu berupaya sekuat tenaga untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan semua kegiatan dapat terlaksana dan anggaran bisa terserap. Diantara upaya yang kami lakukan adalah mengintensifkan komunikasi dengan pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, meningkatkan frekuensi evaluasi progress serta mencari inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Pertanyaan :

Usulan Pagu Anggaran tahun 2022

- Fraksi Partai NasDem mendukung penambahan anggaran KKP, melihat besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan yang tidak sebanding dengan anggaran KKP, baik dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maupun untuk meningkatkan pendapatan negara. Besaran target pertumbuhan ekonomi berdasarkan RAPBN 2022 sebesar 5,0 sampai 5,5% dan target inflasi 3% harus diikuti dengan ketersediaan pangan seiring dengan proyeksi peningkatan permintaan akibat membaiknya daya beli masyarakat. Untuk itu Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk menambah dan mempermudah penyaluran bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat terus meningkatkan produksi kelautan dan perikanan nasional.
- Fraksi Partai NasDem memandang pentingnya keberpihakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu persoalan yang sering dialami oleh nelayan dan pembudidaya ikan adalah terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan usaha. Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk terus mempermudah prosedur dan meningkatkan nilai fasilitas kredit yang diberikan sehingga berdampak signifikan bagi para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
- Fraksi Partai NasDem mendorong agar KKP memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pemberdayaan UMKM sektor kelautan dan perikanan, terutama yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Peningkatan kualitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan harus terus didukung dengan menambah ketersediaan fasilitas yang memadai di sentra-sentra produksi hasil laut dan perikanan.
- Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk terus meningkatkan jumlah target sasaran pelatihan dan penyuluhan sehingga terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan Fraksi Partai Nasdem terkait usulan anggaran tahun 2022. Ini semua akan menjadi perhatian kami dalam menyusun usulan anggaran

tahun 2022 terutama terkait mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, pemberdayaan UMKM sektor kelautan dan perikanan serta mendorong KKP untuk terus meningkatkan jumlah target sasaran pelatihan dan penyuluhan. KKP senantiasa berusaha untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan usaha di bidang kelautan dan perikanan, dimana target tahun 2021 (pasca refocusing) untuk pelatihan dengan target 15.000 orang dan 41.000 kelompok masyarakat yang disuluh (didampingi). Adapun rencana tahun 2022 berdasarkan pagu alokasi anggaran (sementara) target pelatihan meningkat sebanyak 25.000 dan pendampingan sebanyak 41.000 kelompok.

1. Bapak H. Sulaeman L Hamzah (Kapoksi Partai Nasdem-Papua)

a. Pertanyaan :

Terkait dengan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, kami meminta kepada KKP untuk memberikan perhatian serius dan melakukan Langkah-langkah perbaikan dengan permasalahan dalam laporan keuangan yang menjadi temuan BPK yang menjadikan KKP mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu:

- i. Temuan terhadap Kebijakan perizinan pelaksanaan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2020 yang diterbitkan mendahului aturan untuk pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea keluar atas transaksi ekspor BBL yang mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kehilangan potensi PNBP dari transaksi ekspor BBL tersebut:
- ii. Temuan terhadap Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengandung kelemahan sehingga terdapat permasalahan dalam pengelolaan kas pada BLU LPMUKP serta pengelolaan pendapatan dan belanja BLU yang kurang tertib bukti pertanggungjawabannya; serta
- iii. Temuan terhadap PNBP dari pendapatan Jasa Pelabuhan dan Perikanan tidak dapat diyakini kewajarannya karena pendapatan tersebut hanya dicatat hanya berdasarkan estimasi pendapatan selama setahun.

Kami juga meminta kepada KKP untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Tanggapan :

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Itjen KKP telah berkoordinasi dengan jajaran Eselon I lingkup KKP lainnya untuk segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan tersebut sesuai rekomendasi dari BPK RI. Salah satu yang terkait dengan merevisi PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di KKP dan telah diterbitkan penggantinya menjadi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di KKP dimana terdapat pengaturan nilai PNBP terkait dengan Lobster. Untuk temuan di BLU LPMUKP, Itjen akan melakukan pengawasan terhadap perbaikan-perbaikan SPI di LPMUKKP

sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. Sedangkan terkait temuan terkait dengan jasa Pelabuhan dan Perikanan, saat ini Itjen sedang melakukan pengawasan terhadap perbaikan-perbaikan mengenai hal tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

b. Pertanyaan :

Terkait dengan Evaluasi Anggaran Tahun 2021, kami memberikan catatan terhadap realisasi penyerapan anggaran KKP utamanya pada Ditjen Perikanan Tangkap yang baru terealisasi sebesar 49,69 % atau 55,42% (% realisasi + Outstanding Kontrak), belum ada 60% padahal saat ini sudah akhir bulan Agustus. Kami meminta kepada KKP dan khususnya Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan penyerapan anggaran utamanya terhadap Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang bersentuhan langsung kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan seperti Bantuan Kapal Perikanan, Bantuan Alat Penangkapan Ikan, bakti nelayan dll

Tanggapan:

Terima kasih atas perhatian Bapak Sulaeman Hamzah terhadap penyerapan realisasi anggaran KKP. Terhadap penyerapan anggaran tersebut langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target antara lain (1) mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa, (2) mempercepat proses identifikasi dan penetapan calon penerima dan calon lokasi bantuan, (3) memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional, relevan dan terjadwal, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun, (4) melakukan monitoring dan evaluasi progres penyelesaian kegiatan.

c. Pertanyaan :

Isu-isu aktual lainnya, kami memberikan apresiasi kepada Ditjen PSDKP atas penangkapan dua kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* berbendera Vietnam pada 17 Agustus 2021 lalu di laut Natuna. Kami mendorong KKP untuk terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing* yang ada di wilayah perairan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Tanggapan :

Terima kasih atas dukungan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus menindak tegas para pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing* yang ada di wilayah perairan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan komitmen seluruh unsur pada KKP tersebut, dapat ditunjukkan dengan hasil kinerja operasi pengawasan di laut yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Direktorat Jenderal PSDKP, sampai dengan Agustus 2021 telah berhasil menangkap 130 unit kapal ikan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NEGARA ASAL KAPAL	JUMLAH (UNIT)
1	Indonesia	84
2	Vietnam	25
3	Malaysia	15
4	Filipina	6
TOTAL		130

d. Pertanyaan :

Agar Dirjen Perikanan Budidaya menindaklanjuti proposal Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom tanggal 22 Mei 2021 perihal permohonan bantuan alat excavator yang diperlukan untuk penyiapan lahan perikanan, saluran drainase dan jalan usaha tani oleh Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/ Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat di kampung Asyaman Distrik Arso Swakarsa Kabupaten Keerom dalam upaya pengembangan Kawasan Pertanian dan Perikanan.

Tanggapan :

Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan berkoordinasi dengan dinas Kabupaten Keerom terkait permohonan bantuan excavator yang Bapak informasikan. Untuk selanjutnya terhadap proposal yang memenuhi kriteria dan persyaratan akan dilakukan identifikasi dan verifikasi CP/CL.

e. Pertanyaan :

Beberapa kali sudah disampaikan saat rapat kerja, kebutuhan masyarakat di dapil minta dialokasi alat tangkap untuk kapal ketinting disetiap kampung daerah peisisir untuk menjaga stabilitas ekonomi nelayan kecil.

Tanggapan :

Terkait dengan bantuan pemerintah yang disalurkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini KKP dilaksanakan sesuai dengan Permen KP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mekanisme pemberian bantuan pemerintah dilakukan melalui laman satudata.kkp.go.id. Selain itu, apabila calon penerima bantuan tidak dapat mengakses laman satudata.kkp.go.id usulan juga dapat dilakukan secara manual dengan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal/Badan terkait.

Berkenaan dengan dibutuhkannya bantuan alat penangkapan ikan untuk nelayan di Papua, kami sangat mendukung hal tersebut sebagai bagian dari pengembangan perikanan di Papua yang tentu saja disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, kebutuhan, aspirasi serta kondisi sumber daya ikan setempat. Untuk itu, akan kami koordinasikan lebih lanjut terkait kelengkapan usulan dan proposal untuk selanjutnya diverifikasi secara teknis.

Selain melalui pemerintah pusat, bantuan alat tangkap juga dapat diakses oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui menu DAK fisik sub bidang perikanan tangkap.

2. Ibu Yessy Melania (Fraksi Partai Nasdem-Kalbar II)

a. Pertanyaan :

Evaluasi terkait realisasi Anggaran & Program TA 2021 Khususnya di Wilayah Kalimantan Barat II; kami masih melihat realisasi yang rendah dan komitmen Jajaran KKP dalam menjalankan Program program ke masyarakat daerah sangat lemah. Kami meminta keseriusan MKP dan Jajaran KKP dalam berkomitmen membantu masyarakat KP dan memprioritaskan anggaran ke masyarakat KP. Kami juga mendorong program-program Pemulihan Ekonomi Sosial dan Jaring Pengaman Masyarakat KP harus lebih masif dan menyentuh masyarakat KP di lapangan selama masa PPKM dan Pandemi Covid-19. Sekali lagi kami minta percepatan dan akselerasi realisasi anggran ke masyarakat KP TA 2021 yang sudah ditunggu.

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan Ibu Yessy Melania terhadap hal ini dan akan menjadi perhatian kami agar tetap berkomitmen membantu masyarakat KP dan memprioritaskan anggaran ke masyarakat KP.

b. Pertanyaan :

Terkait RKA K/L TA 2022 di lingkup KKP, Kami mendukung adanya program-program yang menyentuh langsung masyarakat KP dengan tujuan meningkatkan perekonomian. Contohnya; rantai pasokan dingin di Kapuas Hulu melihat potensi ikan yang cukup baik, Pengembangan tempat pendaratan dan pelelangan ikan, Speed boat untuk pengawasan, mesin pakan ikan, keramba jaring apung untuk pembudidaya di danau, dll. Kami juga melihat dan memperhatikan dalam bahan paparan belum ada perhatian maksimal kepada potensi Perairan Umum Darat khususnya Wilayah Danau Sentarum di Kab. Kapuas Hulu sebagai wilayah pedalaman, perbatasan dan aset nasional bahkan internasional.

Tanggapan :

Terima kasih atas dukungan yang Ibu sampaikan. Kami sependapat dengan Ibu Yessy Melania bahwasannya penyediaan sarana rantai dingin penting untuk mempertahankan nilai ekonomi ikan sehingga berdampak pada perekonomian pelaku usaha. Berkenaan dengan hal itu, Ditjen PDSPKP pada perencanaan tahun 2022 merencanakan kegiatan fasilitasi Sarpras untuk menjaga mutu hasil perikanan seperti Chest Freezer dan lain sebagainya. Kami berharap usulan tersebut disampaikan kepada kami dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan berkoordinasi dengan dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten kapuas Hulu terkait pengembangan

perikanan budidaya di perairan umum (Danau Sentarum). Untuk mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang terukur, maka pemanfaatan perairan umum sebagai lokasi budidaya ikan perlu dilakukan secara terencana yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific based*). Adapun terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan berupa bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.

Terkait dengan pengelolaan perairan darat di wilayah Kab. Kapuas Hulu, dapat kami sampaikan bahwa melalui DAK tahun 2022 DJPT mendorong pembangunan TPI perairan darat serta bantuan kapal perikanan ukuran <3GT beserta alat penangkapan ikannya untuk nelayan perairan darat di Kab. Kapuas Hulu. Namun demikian, perlu dukungan dari Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu untuk penyampaian pengusulannya serta penyiapan calon penerimanya.

Dalam hal penyediaan speedboat untuk pengawasan di wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendukung dengan menyediakan kegiatan pengadaan speedboat pengawasan pada Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan.

c. Pertanyaan :

Terkait DAK TA 2022; Saya memberikan dukungan kepada MKP agar alokasi anggaran DAK bisa difokuskan dalam peningkatan dan pengembangan budidaya. Khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Kab. Kapuas Hulu) Spesifik pengembangan perikanan perairan umum darat (PUD) beserta potensi Ikan Endemik bernilai ekonomi tinggi. Serta memastikan Sarpras KP di seluruh Indonesia mendapat peningkatan maupun perbaikan.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan dan saran yang Ibu sampaikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan meningkatkan koordinasi dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota serta unit kerja terkait. Selain itu, DJPT telah mendorong adanya pembangunan TPI perairan darat dan bantuan kapal perikanan beserta alat penangkap ikannya di Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya kami mohon dukungan dari Ibu Yessy Melania.

d. Pertanyaan :

Melihat potensi potensi di Kapuas Hulu, kami mendorong adanya program yang berkaitan dengan rantai pasokan dingin, pengembangan tempat pendaratan dan pelelangan ikan, speed boat pengawasan, mesin pakan ikan, dan keramba jaring apung.

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan Ibu. Masukan ini akan menjadi perhatian kami ke depan terkait potensi perikanan di Kapuas Hulu dan mendorong program-

program yang berkaitan dengan rantai pasokan dingin, pengembangan tempat pendaratan dan pelelangan ikan, speed boat pengawasan, mesin pakan ikan, dan keramba jaring apung.

e. Pertanyaan :

Kami secara khusus mendorong dan meminta, MKP dan Jajaran KKP dalam mengalokasikan anggaran TA 2022 dan DAK 2022 memprioritaskan dan memberikan keberpihakan kepada potensi PUD di Wilayah Kalimantan Barat II. Baik pengembangan jalur logistik, budidaya, industri perikanan, dan pemberdayaan masyarakat KP.

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan Ibu. Masukan ini akan menjadi perhatian kami ke depan terutama terkait kriteria teknis dan menu DAK provinsi dan kabupaten untuk tahun 2022.

f. Pertanyaan :

Mendorong alokasi DAK difokuskan pada peningkatan dan pengembangan budidaya perikanan perairan umum darat beserta potensi ikan endemic bernilai ekonomi tinggi di wilayah Kalimantan Barat II. Mendorong pengembangan jalur logistik, budidaya, industri perikanan, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan Ibu. Masukan ini akan menjadi perhatian kami ke depan terutama terkait kriteria teknis dan menu DAK provinsi dan kabupaten untuk tahun 2022.

3. Bapak Abdullah Tuasikal (Fraksi Partai Nasdem – Maluku)

a. Pertanyaan :

Sebagaimana yang ditampilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Opini yang ditetapkan oleh BPK atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dengan hasil capaian opini WDP ini mohon dijelaskan temuan apa saja menyebabkan sehingga mendapat opini WDP Selanjutnya dari temuan tersebut bagaimana tindak lanjutnya sampai saat ini. Kami berharap agar pelaporan keuangan dari hasil penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan baik dan dapat dikonsultasikan dengan pihak BPK kalau ada kesulitan pengelolaannya. Selain itu kami juga berharap agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai standar kualitas agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tanggapan :

Temuan BPK yang menjadikan KKP mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan LK KKP Tahun 2020 yaitu:

- d. Temuan terhadap Kebijakan perizinan pelaksanaan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2020 yang diterbitkan mendahului aturan untuk pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea keluar atas transaksi ekspor BBL yang mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kehilangan potensi PNBP dari transaksi ekspor BBL tersebut:
- e. Temuan terhadap Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengandung kelemahan sehingga terdapat permasalahan dalam pengelolaan kas pada BLU LPMUKP serta pengelolaan pendapatan dan belanja BLU yang kurang tertib bukti pertanggungjawabannya; serta
- f. Temuan terhadap PNBP dari pendapatan Jasa Pelabuhan dan Perikanan tidak dapat diyakini kewajarannya karena pendapatan tersebut hanya dicatat hanya berdasarkan estimasi pendapatan selama setahun.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Itjen telah berkoordinasi dengan jajaran Eselon I lingkup KKP lainnya untuk segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan tersebut sesuai saran dari BPK RI. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat menjadikan opini LK KKP Tahun 2021 menjadi WTP.

b. Pertanyaan :

Setelah kami melihat realisasi anggaran KKP tahun 2021 seperti yang ditampilkan pada slide 8 menunjukkan bahwa realisasi anggaran tahun 2021 baru mencapai 56,36 persen sampai saat ini. Dengan sisa waktu 3 bulan lagi apakah bisa direalisasikan sampai mendekati 100 persen? apalagi penyerapan pada Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya baru mencapai 49 persen. Kendala apa saja yang dialami oleh kedua dirjen tersebut dalam realisasi program dan anggarannya. Kami berharap dan menyarankan agar program kerja yang direalisasikan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran dan kelengkapan laporan, tetapi outputnya harus sesuai standar kualitas agar dampak dari program dan kegiatan yang direalisasikan memberikan manfaat dan multiplier efek bagi masyarakat terutama pada masa pandemi covid saat ini.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan dan saran yang Bapak sampaikan, kami selalu berupaya sekuat tenaga untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan semua kegiatan dapat terlaksana dan anggaran bisa terserap. Kami tetap optimis penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran akan mendekati 100%. Kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya gagal lelang pada sebagian kegiatan prioritas DJPT. Namun demikian, kami telah melakukan upaya percepatan termasuk telah melakukan lelang ulang. Selain itu, kami terdapat pula kegiatan yang masih dalam proses PBJ (proses lelang/lelang ulang, masa sanggah, dll) sehingga belum masuk dalam outstanding kontrak.

Kami sangat sependapat dengan Bapak Abdullah Tuasikal, bahwa output kegiatan harus jelas dan memiliki standar kualitas yang memadai serta memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan. Upaya yang kami lakukan adalah mengintensifkan komunikasi dengan pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, meningkatkan frekuensi evaluasi progress serta mencari inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Pertanyaan :

Kami sebagai warga Maluku sangat senang dan bersyukur atas penetapan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Maluku dan sekitarnya, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Maluku, menyerap lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor perikanan, meningkatkan taraf hidup nelayan dan sejumlah manfaat lainnya. Namun sampai saat ini kelihatannya pemerintah pusat belum serius karena belum ada perkembangan yang berarti dan belum ada aksi nyata dari program strategis nasional tersebut. Bahkan sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengikat, begitupula dengan lembaga pengelola yang juga belum terbentuk. Lewat kesempatan ini, saya mewakili masyarakat Maluku mengusulkan agar segera diterbitkan payung hukum yang konkrit untuk penetapan dan pengelolaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Kemudian yang kedua adalah segera dibentuk Badan Pengelola Lumbung Ikan Nasional. Terkait penetapan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, kami meminta keseriusan pemerintah pusat melalui KKP untuk segera memberi progres yang lebih konkrit melalui penerbitan payung hukum dan pembentukan badan pengelola lumbung ikan nasional. Mengusulkan DAK dan usulan anggaran tambahan dapat juga dialokasikan dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung di Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Tanggapan :

Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan Program M-LIN masih terfokus pada pengembangan Pelabuhan Ambon Baru sebagai zona inti dari program besar M-LIN. Sejak Juni 2021, telah terbit berbagai dokumen kesepakatan terkait kerangka KPBU dalam pengembangan Pelabuhan Ambon Baru, yang melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenhub, dan KKP. Adapun saat ini, KKP bersama dengan Kemenhub sedang menyusun *Basic Design* Pelabuhan Ambon Baru.

Sejalan dengan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, KKP pun secara paralel telah mengarahkan berbagai program pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka wilayah yang lebih luas untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, sampai WPP 718. Beberapa program meliputi, bantuan pemerintah (sarana prasarana, asuransi nelayan, dll), pemberdayaan nelayan, serta pengembangan beberapa pelabuhan perikanan yang akan menjadi penopang Pelabuhan Ambon Baru. KKP dikoordinatori oleh Kemenkomarves telah dan akan terus berkomitmen untuk melibatkan peran serta partisipasi pemerintah daerah pada pelaksanaan seluruh proses tersebut.

d. Pertanyaan :

KKP tahun 2022 kami belum melihat program pengembangan kawasan UMKM perikanan, yang ada hanya berupa program fasilitasi UMKM. Padahal keberadaan dan pengembangan UMKM pada sektor perikanan dan kelautan sangat diperlukan, mengingat nilai tambah sektor perikanan kita masih rendah dan produk yang sangat beresiko cepat rusak. Selain itu pengembangan UMKM sektor perikanan memiliki potensi pangsa pasar ekspor yang besar yang dapat menambah devisa dan peningkatan penyerapan tenaga kerja ditambah lagi potensi sumberdaya perikanan yang berlimpah dan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Jadi menurut kami program dan kegiatan pengembangan UMKM sangat penting sehingga kami mengusulkan agar pada tahun anggaran 2022 harus diprogramkan Pengembangan UMKM perikanan untuk pengolahan hasil perikanan dan pascapanen melalui usulan anggaran tambahan. Seperti kasus masyarakat yang tinggal di pesisir Kabupaten Maluku Tengah dimana pada musim tertentu harga ikan sangat mahal, padahal potensi ikan sangat besar, namun karena masih kurangnya usaha UMKM sehingga produk ikan yang ditangkap cepat rusak dan tidak bisa disimpan lama, Kalau bisa dana alokasi khusus juga diarahkan untuk pembangunan UMKM perikanan dan pembangunan fasilitas pengolahan pascapanen produk perikanan. Beberapa kali kunjungan kami di Dapil mereka mengusulkan bantuan peralatan pengolahan dan pengawetan ikan, peralatan tangkap dan moda penangkapan ikan.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan Bapak Abdullah Tuasikal untuk merealisasikan program pengembangan kawasan UMKM Perikanan. Oleh karenanya melalui anggaran yang tersedia dan terbatas, melalui APBN 2022 Ditjen PDS mengusulkan pembangunan sentra pengolahan ikan dimana bangunan inii berfungsi untuk memusatkan para pengolah ikan skala UMKM untuk menghasilkan agregat kuantitas produksi sehingga lebih efisien dan lebih mudah dilakukan pembinaan, dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sekaligus memenuhi kebutuhan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selain itu untuk mendukung akses pembiayaan pada kawasan perikanan, khususnya bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan skala UMKM, Ditjen PDSPKP memfasilitasi pengembangan kelembagaan usaha, kewirausahaan serta pembiayaan melalui kredit program (KUR, KUMI, dll) yang dalam implementasinya dilakukan dengan melibatkan para anggota Komisi 4 DPR RI dalam bentuk Bimbingan teknis.

Selain itu, Ditjen PDS dengan alokasi anggaran yang tersedia tetap berkomitmen memfasilitasi Bantuan Pemerintah untuk pengolah ikan berupa *chest freezer* dan peralatan pengolahan dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan peningkatan komitmen penerapan jaminan mutu dengan memberikan bantuan peralatan yang memenuhi standar.

e. Pertanyaan :

Di era pandemi covid ini sektor yang berbasis sumberdaya alam seperti pertanian dan perikanan harus menjadi bumer atau penopang utama perekonomian Indonesia disaat sektor industri dan sektor jasa sedang lesu. Mengingat Sektor perikanan kita memiliki kekayaan yang berlimpah terutama di Kawasan Timur Indonesia, sudah saatnya ditingkatkan produksinya, ditingkatkan kualitasnya dan ditingkatkan nilai tambahnya agar dapat terjadi penetrasi ekspor yang besar yang menghasilkan devisa negara dan mengurangi defisit transaksi berjalan (neraca perdagangan barang dan jasa kita). Beberapa program dan kegiatan yang perlu dimasukkan pada tahun anggaran 2022 maupun usulan anggaran tambahan tahun 2022 adalah seperti pembinaan produksi pengolahan hasil perikanan, pemberian armada dan peralatan penangkapan, penyuluhan dan pembinaan budidaya produk perikanan ekspor dan tak kalah penting adalah melakukan promosi yang gencar ke luar negeri untuk merebut pangsa pasar ekspor.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan Bapak Abdullah Tuasikal, pada tahun 2022 dalam mendukung peningkatan produksi, kualitasnya dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain :

1. Pembinaan pengolahan dan bina mutu pada UPI skala Menengah, Besar, dan Mikro Kecil
2. Pembinaan UMKM pengolah dan pemasar ikan dalam inkubator bisnis
3. Penyediaan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, keirausahaan dan permodalan
5. Promosi produk perikanan skala internasional di USA, EU, Korea, China, dan Indonesia (penyelenggara)

Dukungan penyuluhan pada program prioritas KKP antara lain:

1. Mobilisasi Penyuluh Perikanan untuk pendampingan teknis, manajemen usaha dan pembinaan kelembagaan pembudidaya, nelayan. Pengolah/pemasar dan Petambak garam.
2. Mobilisasi Penyuluh Perikanan sebagai enumerator beserta enumerator dinas perikanan untuk penyediaan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan pembangunan kelautan dan perikanan.

f. Pertanyaan :

Sebagai evaluasi dan strategi penyusunan program setelah penghematan 2021 sampai pada tahun 2024 tentunya kita perlu melihat keberadaan masyarakat yang ada pada pulau-pulau kecil terpencil dan terisolasi yang mayoritas mereka adalah bermatapencaharian pada sektor perikanan. Keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga NKRI dan memerlukan perhatian khusus tentunya agar kehidupan dan aktivitas ekonominya bisa layak saja dan tidak berlebihan. Kami ingin penjelasan program apa saja yang telah dilakukan KKP pada tahun 2020 & 2021 dan program apa saja pada RKA 2022 untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir daerah pada pulau-pulau kecil, terpencil, terisolasi dan pulau terluar yang menjaga laut dan pulau kita. Kami mengusulkan agar dana alokasi khusus bisa dimanfaatkan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil, terpencil dan terisolasi.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan masukan Komisi IV DPR RI. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kemanafaatannya bagi kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penerbitan Sertipikat Hak atas tanah (berupa Hak Pakai atau Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan di pulau-pulau kecil terluar. Kegiatan ini bertujuan untuk 1) menjaga kedaulatan Negara; 2) melakukan penataan aset negara; 3) meningkatkan PNBPN melalui upaya pemanfaatan PPK/T; 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T.

Sampai dengan tahun 2021, KKP c.q. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut telah menerbitkan 44 (empat puluh empat) Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T yaitu: 1. Pulau Damar, 2. Pulau Berakit, 3. Pulau Malangberdaun, 4. Pulau Batukolotok, 5. Pulau Nusamanuk, 6. Pulau Tokongbelayar, 7. Pulau Tokongmalangbiru, 8. Pulau Nipa, 9. Pulau Tokongnanas, 10. Pulau Wunga, 11. P. Pagai Utara, 12. Pulau Sebetul, 13. Pulau Sambit, 14. Pulau Sebatik, 15. Pulau Rupert, 16. Pulau Bengkalis, 17. Pulau Salando, 18. Pulau Lingayan, 19. Pulau Jiew Besar, 20. Pulau Intata, 21. Pulau Marampit, 22. Pulau Batugoyang, 23. Pulau Kultubai Utara, 24. Pulau Nuhu Yut, 25. Pulau Simeulue Cut, 26. Pulau Tokongboro, 27. Pulau Sekatung, 28. Pulau Subi Kecil, 29. Pulau Fani, 30. Pulau Budd/Moff, 31. Pulau Mangkai, 32. Pulau Kabaruan, 33. Pulau Selaru, 34. Pulau Larat, 35. Pulau Batarkusu, 36. Pulau Rangsang, 37. Pulau Bertuah, 38. Pulau Sabu, 39. Pulau Rusa, 40. Pulau Raya, 41. Pulau Pelamong, 42. P. Batuberantai, 43. P. Bongkil, dan 44. P. Rote.

Selain program pensertipikatan hak atas tanah di PPK/T, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai program prioritas yaitu:

1. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut bertanggungjawab dalam pembangunan SKPT di Kab. Pulau Morotai, Kab. Mentawai, Kab. Talaud, dan Kab. Moa. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Pembangunan SKPT diarahkan untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis khususnya produk perikanan bernilai ekonomis tinggi dengan mempertimbangkan potensi perikanan dan kelautan yang tersedia. Beberapa sarana prasarana yang dibangun antara

lain: pabrik es, bangunan ICS, kapal beserta alat tangkap, penyediaan BBM dan bantuan permodalan bagi kelompok nelayan melalui LPUMKP;

2. Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang serta mempermudah naik turunnya penumpang. Keberadaan dermaga apung/tambat labuh diharapkan dapat membentuk interaksi ekonomi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan pulau kecil dalam menggunakan moda transportasi laut. Pada Tahun 2021 Ditjen PRL akan membangun prasarana dermaga apung di 5 lokasi yaitu: Kab. Probolinggo, Kota Bima, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Tojo Una Una, dan Kab. Sinjai. Dikarenakan adanya refocusing anggaran, maka kegiatan pembangunan dermaga apung di 5 lokasi dimaksud akan dialihkan ke Tahun 2022.

3. Bantuan Ekonomi Produktif di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan stimulan berupa penyediaan bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Bentuk bantuan antara lain: Alat pengolahan produk dan hasil kelautan dan perikanan, Perahu / jukung ≤ 5 GT, Mesin Tempel dengan kapasitas Max 40 PK, Mesin Katinting kapasitas Max 15 PK, Cool Box, dan bentuk bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi kelompok masyarakat.

Tahun 2022, Ditjen PRL akan mengalokasikan 15 paket bantuan kepada kelompok masyarakat di Pulau-pulau Kecil Terluar yaitu di: Pulau Rangsang, Pulau Rote, Pulau Bongkil, Pulau Sabu, Pulau Kultubai, Pulau Bertuah, Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, Pulau Mangkai, Pulau Letti, Pulau Liran, Pulau Salaut Besar, Pulau Berhala, dan Pulau Lusi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada lokasi prioritas yaitu pulau-pulau kecil terluar serta dukungan kelompok masyarakat terhadap program sertifikasi hak atas tanah di pulau-pulau kecil terluar.

4. Pengakuan dan Penguatan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Tradisional, dan Lokal Di Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai salah satu komunitas masyarakat yang eksis di Negara Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan masyarakat lainnya, diantaranya adalah lembaga adat yang masih aktif, memiliki aturan adat dalam tatanan kehidupannya serta adanya keberadaan situs adat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Situs adat merupakan aset yang harus dijaga dan menjadi bukti nyata bahwa MHA memiliki ikatan asal usul yang jelas (sejarah) dengan leluhurnya. Melindungi dan melestarikan keberadaan situs adat sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dari perspektif pemerintahan, struktur pemerintahan adat di tingkat desa juga telah diatur dan diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara, untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional harus memperhatikan praktik-praktik kearifan lokal serta tradisi dan budaya.

Selain MHA di wilayah pesisir juga terdapat komunitas masyarakat lokal dan tradisional yang juga memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, umumnya masyarakat di wilayah ini masuk dalam kategori usaha mikro-kecil (UMK). Sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha masyarakat di wilayah tersebut, Sampai dengan tahun 2024, target komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya adalah sebanyak 30 komunitas yang terbagi dalam Rencana Kerja setiap tahunnya.

g. Pertanyaan :

Dalam rangka mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional yang akan mengintegrasikan kegiatan usaha perikanan mulai dari hulu (sumberdaya alam), masyarakat yang tinggal di pesisir, UMKM perikanan, Industri pengolahan perikanan baik skala kecil, menengah sampai pada skala besar yang mampu meningkatkan nilai tambah, memunculkan industri turunan sampai ekspor, yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian daerah dan nasional seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, munculnya industri turunan, peningkatan ekspor, meningkatkan devisa dan manfaat lainnya. Maka kami mengusulkan agar sebagian dana alokasi khusus dan usulan dana tambahan dapat dialokasikan ke provinsi Maluku yang dapat mendukung mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, seperti pembangunan pelabuhan pendukung, pengembangan masyarakat, peningkatan teknologi penangkapan ikan masyarakat, sarana penyimpanan dan pengawetan, dan kebutuhan lainnya.

Tanggapan :

Terima kasih atas usulan Bapak Abdullah Tuasikal terhadap pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) dan usulan dana tambahan mendukung dan mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Dalam Rencana Kerja Anggaran KKP Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran dukungan dalam rangka mewujudkan MLIN pembangunan pelabuhan pendukung MLIN, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan masyarakat, kegiatan budidaya, penyediaan sarana penyimpanan dan pengawetan ikan. KKP juga telah mengusulkan usulan tambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 8,043 triliun yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung MLIN yang belum tertampung di RKAKL KKP Tahun 2022.

Untuk DAK Bidang KP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat mengambil pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota dapat mengambil menu Kabupaten/Kota adalah pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan, sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil, sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan MLIN.

h. Pertanyaan :

Mendorong pengembangan UMKM perikanan dan pembangunan fasilitas pengolahan pasca panen produk perikanan dan bantuan peralatan tangkap dan moda penangkapan ikan bagi masyarakat di pesisir Kabupaten Maluku Tengah.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan usulan dari Bapak Abdullah Tuasikal untuk mendorong penguatan pasca panen dan kegiatan hilirisasi lainnya. Berkenaan dengan hal itu, kami mendorong agar kelompok dan pemerintah daerah dapat mengusulkan hal dimaksud dengan menyertai kelengkapan seperti proposal kegiatan, ketersediaan lahan, listrik, dan air, kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima, memanfaatkan, serta mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan operasional.

5. Bapak Edward Tanuur, S.H (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – NTT II)

a. Pertanyaan :

Kami memberikan apresiasi kepada KKP karena pencapaian penyerapan dananya masih kurang maksimal, mudah – mudahan bisa diperbaiki supaya penyerapan bisa dipercepat sehingga peluang untuk refocusing kemungkinan kecil karena dana sudah terserap dan sudah dinikmati oleh masyarakat.

Tanggapan :

Terima kasih atas dukungan dan masukan Bapak Edward Tanuur. Masukan dari Komisi IV akan menjadi perhatian untuk penyelenggaraan anggaran di KKP.

b. Pertanyaan :

KKP perlu mendorong DAK untuk membangun sentra pakan budidaya guna menekan harga pakan yang mahal sehingga pembudidaya ada keuntungan.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan catatan yang Bapak sampaikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan berkoordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota supaya DAK dan sumber pembiayaan pembangunan lainnya dioptimalkan untuk mendukung pembangunan perikanan budidaya. Diantaranya untuk meningkatkan keuntungan usaha dan mengurangi ketergantungan dengan impor, maka dikembangkan program pakan mandiri dengan bahan baku lokal.

c. Pertanyaan :

Pengembangan sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya serta produksi olahan perikanan akan sangat membantu nelayan dalam pemasaran untuk meningkatkan ekonomi rakyat, ini semua tertuju bagaimana rakyat bisa sejahtera.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan Bapak Edward Tanuur, oleh karenanya dalam rancangan kegiatan dan anggaran tahun 2022 KKP melalui Ditjen PDS menginisiasi pembangunan sentra pengolahan ikan berbasis wilayah secara terpadu dengan harapan mengakselerasi kegiatan pengolahan ikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ditjen Perikanan Budidaya akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya dan perluasan pangsa pasar. Sehingga diharapkan di masa datang pembudidaya ikan memiliki jaminan pasar bagi produksi yang dihasilkan.

d. Pertanyaan :

Pengembangan UKM perlu dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan perkembangan teknologi sehingga UKM mampu bersaing dan UKM perlu diperbanyak.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan Bapak Edward Tanuur, oleh karenanya dalam rancangan kegiatan dan anggaran tahun 2022 Ditjen PDS telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya mendorong UKM mampu mengkases teknologi, mutu, akses pembiayaan, dan perluasan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Pertanyaan :

Penyediaan sarana dan prasarana pergaraman sangat penting dilakukan dan perlu juga memperhatikan mutu sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi garam secara layak.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Peningkatan kualitas garam (kandungan NaCl) dapat dilakukan pada tahap produksi serta pasca produksi. Peningkatan kualitas garam di tahap produksi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: integrasi lahan garam dan penggunaan alat pemurnian garam metode elektrolisis. Sedangkan pada tahap pasca produksi, KKP akan membangun washing plant (pabrik pencucian atau pemurnian) garam yang mengolah garam bahan baku menjadi garam konsumsi beriodium atau garam industri. KKP melaksanakan kegiatan tersebut di atas melalui program PUGAR.

6. Ibu Riezky Aprilia, S.H., M.H. (Fraksi PDIP – Sumatera Selatan I)

a. Pertanyaan :

NTN bahwa dicantumkan NTN ini masuk ke dalam indikator makro menjadikan status nelayan beserta produksi penting dan strategis dalam kebijakan makro ekonomi oleh karena itu, kami harap KKP membuat program yang afirmatif berpihak kepada nelayan kecil agar mereka sejahtera.

Tanggapan :

Terima kasih Ibu Riezky Aprilia atas masukannya. Dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan KKP disusun dengan mengedepankan kepentingan nelayan kecil. Hal ini selaras dengan visi KKP yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Arahan Ibu Riezky Aprilia akan kami pegang sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan KKP kedepan.

b. Pertanyaan :

Postur APBN 2021 memberikan pembiayaan yang *extraordinary* untuk budidaya, padahal sebelumnya sudah dikoreksi dan masih muncul angkanya. Kami KKP membuat anggaran yang proposional untuk kesejahteraan nelayan.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan catatan yang Ibu sampaikan. Potensi pengembangan perikanan budidaya yang dimiliki Indonesia masih terbuka luas untuk dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk pembiayaan *extraordinary* yang terkait dengan pembangunan Kawasan budidaya udang terintegrasi senilai Rp250 Miliar, merupakan salah satu bentuk untuk memajukan pembudidaya udang di lokasi yang menjadi sasaran pembangunan. Pembudidaya akan menjadi bagian dari program ini dan diharapkan dampak yang muncul adalah peningkatan kesejahteraan dan juga produktifitas lahan serta efek peningkatan ekonomi daerah.

Namun, kami mohon masukan dan dukungan dari para anggota komisi IV DPR agar semua nya dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan pembudidaya.

c. Pertanyaan :

Masalah di perikanan tangkap dimana ada pengelolaan 11 WPP, WPP ini harus dikelola dengan satu data yang konkret karena ini sebagai landasan KKP berpijak. Data dari observer, teknologi yang akan bapak inject dalam program KKP agar dapat maksimal, tetapi tidak meninggalkan modernisasi untuk para nelayan.

Tanggapan :

Terima kasih Ibu Riezky Aprilia atas saran dan masukan yang diberikan. Tepat sekali bahwa pengelolaan WPP NRI memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai landasan kebijakan pengelolaan. Penggunaan teknologi informasi terkini merupakan sarana utama untuk mengakselerasi pengelolaan data di WPP NRI. Seiring dengan hal tersebut, modernisasi di tingkat nelayan juga hal penting untuk kita akselerasi bersama. Untuk itu, kami mohon dukungan Ibu Riezky Aprilia dalam penambahan anggaran KKP tahun 2022 agar penggunaan teknologi informasi dan modernisasi nelayan dapat kita laksanakan dengan baik dan optimal.

Sesuai dengan Amanah UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 7 (Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan) mengamanatkan Pemerintah Pusat untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPPNRI dengan alur sebagai berikut :

- a. didahului dengan kajian stok sumber daya ikan di 11 WPP NRI. Kegiatan kajian stok sumber daya ikan dilakukan oleh Balai Riset Perikanan Laut (BRSDM) dimulai dengan pengumpulan data baik primer maupun sekunder (dari sumber lain), pemrosesan data dan analisis data sehingga dihasilkan. Input/sumber data untuk proses dan pemodelan berupa:
 - Data tangkapan (*Catch*) & upaya (*effort*) yang bersumber dari statistik perikanan tangkap (DJPT, 2005-2016) dan One data Pusdatin (2017-2019);
 - Data biomassa dan sebarannya dari data hidroakustik perikanan dari riset BRPL (2015 – 2020); dan
 - Data biologi parameter populasi dari riset BRPL 2017-2019. Kedepan untuk input/sumber data untuk analisis akan menambahkan hasil analisis dari data satelit.
- b. Hasil pemrosesan dan pemodelan kemudian dianalisis oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan/KOMNASKAJISKAN (sebagaimana tugas dan fungsinya diatur dalam Permen KP no 20 tahun 2021. Selanjutnya KOMNASKAJISKAN menyampaikan hasil analisisnya berupa rekomendasi Estimasi Potensi, JTB, Tingkat Pemanfaatan di WPP NRI kepada Menteri KP sebagai dasar pengelolaan perikanan.

Hasil kaji stok terbaru (sebagai pembaharuan Kepmen 50/02017) telah di sampaikan kepada Menteri KP oleh Komnaskajiskan dan menunggu proses penetapan.

d. Pertanyaan :

Terkait permasalahan yang ada di Ditjen PDS, kami menyarankan PDS ini fokus untuk menyelesaikan program - program yang mangkrak. Apabila program mangkrak kebanyakan status akan tetap WDP kedepannya.

Tanggapan :

Ditjen PDS sependapat dan berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan sarana prasarana yang saat ini masih belum operasional sesuai dengan kewenangannya. Apabila sarana prasarana tersebut telah menjadi aset daerah Ditjen PDS akan senantiasa berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis bagi pemerintah daerah untuk dapat mempercepat operasionalisasi sarpras dimaksud.

e. Pertanyaan :

Terkait BRIN yang sudah berdiri dan setau kami ada *due date* dan sudah harus tuntas dan *running* di tahun 2022, di KKP ada BRSDM, statusnya seperti apa? saran kami buatlah badan pengembangan kebijakan. Status SDM yang ada di KKP seperti apa? Apakah 50:50 dengan BRIN?

Tanggapan :

Saat ini KKP sedang melakukan penataan organisasi sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpres 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terkait dengan penataan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan telah bersurat ke Presiden melalui surat Nomor R.204/MEN-KP/IV/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penataan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana dalam usulan tersebut salah satu usulannya adalah pembentukan Badan Kebijakan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai pengganti dari Badan Riset dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Badan baru ini nantinya akan menjadi penghubung antara KKP dengan BRIN terkait dengan kebutuhan riset yang diperlukan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan konsep ekonomi biru. Dengan adanya Badan baru ini nantinya hasil-hasil riset kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh BRIN akan dilakukan alih teknologi kepada KKP untuk selanjutnya akan digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Selain untuk perumusan kebijakan, hasil riset BRIN yang berupa teknologi tepat guna akan dilakukan transfer teknologi kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk penerapan teknologi. Selain itu dalam Badan baru ini nantinya akan dilakukan pemilihan teknologi dari hasil riset dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk pengembangan produk-produk pangan, dan farmasi.

Untuk aset ex riset yang ada di KKP, akan tetap menjadi aset KKP, namun untuk keperluan riset di bidang kelautan dan perikanan para peneliti yang beralih status menjadi pegawai BRIN tetap dapat melaksanakan penelitian di unit kerja ex riset. Sedangkan untuk peneliti, sesuai dengan arahan Menteri KP akan berpindah status kepegawaiannya menjadi pegawai BRIN, namun akan ada penugasan dari Kepala BRIN kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KKP. Sehubungan dengan hal tersebut, KKP saat ini sedang menyusun Nota Kesepahaman antara KKP dan BRIN yang menyepakati terkait proses integrasi riset dan inovasi serta penyelenggaraan riset kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Pengalihan lebih

diprioritaskan kepada para peneliti, perekayasa dan teknisi Litkayasa sebagaimana Perpres No.33/2021 tentang BRIN dan Surat MenPAN RB No B/295/M.SM.02.03/2021 Hal Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelaitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana dalam pelaksanaannya para pejabat fungsional tersebut diberikan pilihan untuk melanjutkan fungsionalnya, atau beralih ke jabatan fungsional lain jika tetap menjadi pegawai KKP.

7. Ibu Alien Mus (Fraksi Partai Golongan Karya – Maluku Utara)

a. Pertanyaan :

Hasil audit BPK adalah WDP untuk tahun 2020, ini sudah 4 bulan masa akhir anggaran 2021, realisasi anggaran 2021 masih dibawah 64%, diharakan di akhr tahun pertanggungjawaban anggaran bisa 100%. Kalau tidak bisa sampai, perlu dilihat lagi apa penyebab tidak terealisasi?

Tanggapan :

KKP melalui Itjen akan melakukan pengawalan dan pengawasan atas pencapaian target baik target kinerja maupun target fisik dan serapan anggaran pada TA 2021. Itjen telah berkoordinasi lebih lanjut dengan seluruh unit Eselon I lingkup KKP untuk memastikan penyelesaian kegiatan/program tercapai sesuai target yang ditetapkan termasuk dalam hal penyerapan anggarannya. Unit Eselon I lingkup KKP diharuskan membuat *timeline* yang terukur beserta penanggungjawabnya atas setiap kegiatan pada sisa waktu TA 2021 ini dan Itjen akan mengawasi hal tersebut untuk memastikan tercapainya target kinerja, target fisik dan target serapan anggaran.

b. Pertanyaan :

Anggaran tahun 2021 yang refocusing memang sangat besar dan ini memang dipaksakan oleh KKP mengajukan pemotongan anggaran tanpa di sadari Komisi IV karena dalam keadaan reses, tapi yang harus dilakukan bersama adalah konsultasi KKP dengan mitra Komisi IV. Tolong untuk di jalin silaturahmi agar tidak terjadi salah paham anggota DPR dengan pimpinan dan anggota dengan KKP.

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan Ibu Alien Mus, hal ini akan menjadi perhatian kami. Kami akan mengkomunikasikan secara intens kepada Komisi IV.

c. Pertanyaan :

Perinus dan Perindo tolong kerja sama dengan baik karena data dengan KKP sangat kontradiktif dan akan anggota Komisi IV akan tanya spesifik mungkin karena permasalahan BUMN ini bukan dapat membantu negeri malah merugikan negara.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan Ibu Alien Mus bahwasannya BUMN perikanan perlu bersinergi dengan KKP. Dalam konteks itu perlu segera dilakukan harmonisasi Data antara PT. Perinus (Persero) dan Perum Perindo dengan KKP.

d. Pertanyaan :

Tahun 2022 kemungkinan besar akan ada pemotongan anggaran. Kami mengusulkan apabila KKP dan Komisi IV sudah menyepakati bisa melakukan penyerapan anggaran paling lambat akhir Maret. Mohon dengan sangat anggaran yang sudah diajukan dibahas di RDP nanti, dan meminta hasil audiensi KKP dengan pimpinan untuk dijadikan kerangka acuan tahun 2022.

Tanggapan :

Terima kasih atas masukan dan dukungan Ibu Alien Mus, hal ini akan menjadi perhatian kami ke depan.

e. Pertanyaan :

Kami berharap adanya penjelasan tentang izin kapal baik dari provinsi ataupun di KKP karena masih ada penyalahgunaan izin tersebut dan batas wilayah. Kami sangat mendukung apabila MKP mau melakukan pungutan PNBP Pasca Produksi. Semoga target 12 Triliun dapat tercapai.

Tanggapan :

Terima kasih Ibu Alien Mus atas pertanyaan dan dukungan yang diberikan. Dapat kami informasikan bahwa kewenangan KKP (Pusat) adalah menerbitkan SIUP, perizinan berusaha pada sub sektor penangkapan ikan, dan perizinan berusaha pada sub sektor pengangkutan ikan, untuk kapal perikanan berukuran >30 (tiga puluh) gross tonnage yang beroperasi perairan >12 (dua belas) mil laut dan/atau di laut lepas.

Sedangkan, Provinsi berwenang menerbitkan SIUP, perizinan berusaha pada sub sektor penangkapan ikan, dan perizinan berusaha pada sub sektor pengangkutan ikan, untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage.

Untuk pelanggaran batas wilayah berkenaan dengan andon penangkapan ikan, dapat kami sampaikan bahwa KKP telah menerbitkan Permen KP No. 18 tentang Penempatan API, ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dengan adanya pengaturan teknis andon penangkapan ikan, diharapkan kedepan dapat terjalin hubungan yang harmonis antar pemerintah daerah dan antar nelayan andon dan nelayan lokal, karena Andon Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar gubernur dengan memuat unsur perikanan dan/atau kelautan.

Berkenaan dengan PNBP perikanan tangkap, kami ucapkan terima kasih atas dukungan Ibu Alien Mus.

8. Bapak Dedi Mulyadi, S.H (Fraksi Partai Golongan Karya – Jawa Barat VII)

a. Pertanyaan :

Kami ingin meminta keberpihakan terhadap nasib nelayan yang ada di Babel, kapal KIP masuk ke pantai setiap hari karena berizin dan legal, tetapi Nelayan sudah kehabisan ruang lautnya untuk menangkap ikan dan pada akhirnya mereka diperiksa polisi karena dianggap menghalangi penambangan. Kemudian mereka melakukan aksi naik ke kapal penghisap timah dan akhirnya diproses juga. Sampai hari ini tindakan represif terhadap nelayan masih berlangsung, dalam jangka Panjang Provinsi Bangka Belitung akan kehilangan ikan akibat dari penambangan tersebut.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak Dedi Mulyadi atas nasib nelayan yang ada di Babel. Atas permasalahan tersebut KKP aktif di dalam koordinasi dan pembahasan antar K/L (Kemenko Marinves, Kementerian ESDM, KLHK, Kemendag, Kemendes, Kejaksaan Agung, TNI AL, Polri, LIPI, BPPT, KPK, PT. Timah). Beberapa hal usulan KKP antara lain (1) Aktivitas penambangan harus memperhatikan keberlangsungan ekologi dan kepentingan nelayan yang terdampak akibat kekeruhan perairan, (2) Adanya program bantuan perusahaan tambang yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang terdampak penambangan; (3) penegak hukum agar duduk bersama untuk pengamanan pelarangan ekspor limbah tambang timah, serta untuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pelanggaran kegiatan pertambangan.

b. Pertanyaan :

Di Pangandaran terdapat kapal dari hasil penangkapan kapal asing dan kapal masih tergeletak sampai hari ini, di tahun 2022 bisa di tarik ke pantai untuk digunakan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, diperkirakan dana yang dibutuhkan kurang lebih 500 juta.

Tanggapan :

Terima kasih atas usulan Bapak Dedi Mulyadi untuk memanfaatkan kapal ikan MV Viking Lagos di perairan Kabupaten Pangandaran untuk digunakan sebagai tempat rekreasi edukasi bagi masyarakat dan pendapatan daerah, untuk itu KKP akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Pertanyaan :

Masalah dari para peternak ikan keramba atau kolam itu umumnya adalah mahal harga pakan. Kenapa kita tidak mencoba mendorong Bersama agar para petani ikan di KJA maupun di kolam untuk bisa mengelola sentra – sentra pakan di wilayah masing – masing.

Tanggapan :

Terima kasih atas dukungan, saran dan catatan yang Bapak sampaikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan terus mengembangkan program pakan mandiri sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban biaya produksi pembudidaya ikan dan mengurangi ketergantungan dengan impor. Diharapkan efisiensi biaya produksi dapat meningkatkan nilai tukar dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Program pakan mandiri berupaya memanfaatkan bahan baku lokal dan mendorong pembudidaya atau kelompok pembudidaya sebagai produsen pakan ikan. Program ini tersebar pada sentra-sentra perikanan budidaya, khususnya komoditas ikan air tawar.

9. Bapak Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si (Fraksi PDIP – NTT II)

a. Pertanyaan :

Apresiasi kepada KKP yang telah mengeluarkan Permen KP no. 17/2021 soal larangan ekspor lobster dan larangan budidaya lobster. Berharap kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan terutama nelayan – nelayan kecil dan efek keberlanjutan bisa dicapai, namun ada persoalan terkait pengawasan dan pemantauan perizinan serta verifikasi nelayan yang menangkap benih – benih lobster ini. Izin ini harus ada verifikasi oleh dinas KP, contoh: jenis lobster pasir yang harganya 5.000/ekor, nelayan dipaksa oleh dinas setempat yang berkerjasama dengan pengusaha untuk menjual dengan harga 2.000/ekor. Harus diperiksa betul dinas KP ini.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak Fransiskus Lema untuk melakukan pengawasan dan pemantauan perizinan serta verifikasi nelayan yang menangkap benih – benih lobster, upaya yang akan ditempuh KKP antara lain:

1. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pengawasan bersama aparat keamanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota untuk mencegah terjadinya pemaksaan penjualan benih lobster.
2. Peningkatan kapasitas petugas PPNS KKP melalui pelatihan/bimtek.
3. Mendukung pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku dan/atau oknum yang terlibat.

b. Pertanyaan :

Kenapa 2 dirjen yang sangat vital dan strategis (DJPT dan DJPB) serapannya rendah? Buatlah loncatan – loncatan yang luar biasa penyerapannya dengan program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saat badai seroja terjadi sama sekali tidak ada bantuan dari KKP.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan dan saran yang Bapak sampaikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berupaya sekuat tenaga untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan

semua kegiatan dapat terlaksana dan anggaran bisa terserap. Diantara upaya yang kami lakukan adalah mengintensifkan komunikasi dengan pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, meningkatkan frekuensi evaluasi progress serta mencari inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Terima kasih Bapak Yohanis Fransiskus Lema atas dukungan dan pertanyaan yang diajukan. Saran bapak terkait program dan kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat akan menjadi perhatian kami dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Berkenaan dengan badai seroja yang terjadi di NTT pada beberapa waktu yang lalu, kami telah melakukan identifikasi ke lapangan untuk mendata berbagai kebutuhan nelayan termasuk alat penangkapan ikan yang hilang akibat terkena badai. Selanjutnya nelayan yang terdampak badai seroja tersebut menjadi perhatian kami dalam pengalokasian bantuan pemerintah lingkup DJPT.

c. Pertanyaan :

Sebelumnya BRSDMKP melalui kepalanya menyampaikan kepada kami untuk merekomendasikan nama untuk disekolahkan di Kupang. Sudah ikut tes dan sampai tahap wawancara mereka di telpon untuk membayar 4 – 6 juta untuk biaya seragam. Kenapa hal ini tidak dicantumkan dari awal? Apakah itu benar? Kalau tidak tolong dicopot kepala sekolah tersebut. Staf kami langsung menelpon kepala sekolah untuk menanyakan kejelasannya dan memang dengan jawaban yang sama digunakan untuk seragam.

Tanggapan :

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komisi IV DPR yang memberikan kepercayaan dan mendorong masyarakat, khususnya anak pelaku utama untuk bisa mengikuti pendidikan vokasi yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Seluruh peserta didik yang menempuh Pendidikan di Satuan Pendidikan KP, baik SUPM, Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV, mendapatkan pembiayaan dari APBN KKP yang terdiri dari biaya asrama, biaya makan, praktik regular, praktik di Teaching Factory (TEFA) serta biaya lain yang dikeluarkan untuk praktik di dunia usaha dan dunia industri.
2. Kebijakan pendidikan pendidikan kelautan dan perikanan berpedoman pada 4 Pilar Pendidikan Vokasi KP yaitu pembentukan karakter dan kepribadian unggul, pembentukan kompetensi dasar, pembentukan kompetensi keahlian, dan adaptasi dengan lingkungan. Dalam rangka pembentukan karakter dan kepribadian unggul tersebut salah satunya dilakukan melalui kedisiplinan peserta didik dalam menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
3. Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP, peserta didik dari anak pelaku utama pembelian seragam dibebankan kepada APBN, sedangkan untuk peserta didik dari

umum, pembelian seragam dilakukan secara individu atau dilakukan kolektif setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali peserta didik.

4. Pada DIPA satuan pendidikan KP dialokasikan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama. Biaya tersebut untuk pengadaan pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, sepatu, atribut, dan perlengkapan lainnya. Anggaran biaya pendidikan bagi anak pelaku utama tersebut pada tahun 2021 pasca refocusing tahap 4 sebesar Rp 2.000.000 – Rp 6.000.000 per orang dengan total keseluruhan Rp 2.314.312.000.

10. Bapak drh. H. Slamet (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera – Jawa Barat IV)

a. Pertanyaan :

Pada laporan keuangan tahun 2019, KKP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2020 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI artinya jika merujuk pada status WDP laporan KKP tahun 2020 BPK memberikan catatan "masih terdapat transaksi bernilai material yang mengganggu kewajaran penyajian akun, tetapi tidak bersifat luas (perpasive)". Melalui kesempatan ini kami meminta menteri untuk menjelaskan kepada hadirin semua terkait catatan BPK tersebut.

Tanggapan :

Temuan BPK yang menjadikan KKP mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan LK KKP Tahun 2020 yaitu:

- a. Temuan terhadap Kebijakan perizinan pelaksanaan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2020 yang diterbitkan mendahului aturan untuk pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea keluar atas transaksi ekspor BBL yang mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kehilangan potensi PNBP dari transaksi ekspor BBL tersebut:
- b. Temuan terhadap Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengandung kelemahan sehingga terdapat permasalahan dalam pengelolaan kas pada BLU LPMUKP serta pengelolaan pendapatan dan belanja BLU yang kurang tertib bukti pertanggungjawabannya; serta
- c. Temuan terhadap PNBP dari pendapatan Jasa Pelabuhan dan Perikanan tidak dapat diyakini kewajarannya karena pendapatan tersebut hanya dicatat hanya berdasarkan estimasi pendapatan selama setahun.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Itjen telah berkoordinasi dengan jajaran Eselon I lingkup KKP lainnya untuk segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan tersebut sesuai saran dari BPK RI. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki opini LK KKP Tahun 2021 menjadi WTP.

b. Pertanyaan :

Kami menemukan dilaporan atau dipresentasi yang disampaikan tidak ada catatan capaian kinerja yang ada, apakah ini sengaja tidak disampaikan atau menutupi ketidakmampuan karena tidak mencapai target? Contoh: PDB perikanan target 7.9% realisasi 0.70% sangat jauh dari target, produksi perikanan target 26,46 juta ton realisasi hanya 7.6 juta ton, ekspor USD 6.17 M realisasi USD 0.21 Miliar. Kenapa hal – hal ini tidak tercapai? Mohon dijelaskan.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak H. Slamet terhadap capaian kinerja KKP, adapun capaian kinerja KKP sampai dengan TW II Tahun 2021 antara lain:

1. Kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional cenderung positif dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB subsektor perikanan sebesar 0,73 % pada akhir tahun 2020. Laju pertumbuhan PDB subsektor perikanan triwulan II-2021 mencapai 9,69%, mengalami pertumbuhan signifikan apabila dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang mencapai -0,63% (YoY).
2. Produksi perikanan tahun 2020 mencapai 13,23 juta ton, yang terdiri dari 7,70 juta ton ikan hasil tangkapan dan 5,53 juta ton ikan hasil budidaya. Pada triwulan II-2021 produksi perikanan mencapai 7,34 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap 3,87 juta ton dan perikanan budidaya 3,47 juta ton. Capaian produksi perikanan triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,33% jika dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang sebesar 6,36 juta ton.
3. Nilai Tukar Nelayan pada bulan Juli 2021 sebesar 104,89 atau mengalami peningkatan dibandingkan Juli 2020 sebesar 100,09. Demikian juga dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan telah mencapai 102,35 pada Juli 2021 atau mengalami peningkatan dibandingkan Juli 2020 sebesar 100,40. Hal ini mengindikasikan kuatnya NTN dan NTPi sebagai akibat peningkatan harga produk perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang semakin menguat dibandingkan harga komoditas lainnya.
4. Pada Semester 1 Tahun 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 2,6 miliar atau naik 7,3% disbanding periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 2,4 miliar. Pada periode tersebut, nilai impor produk perikanan mencapai USD 238 juta atau naik 17,3% disbanding periode yang sama tahun 2020 yang mencapai USD 203 juta. Neraca perdagangan surplus sebesar USD 2,35 miliar atau naik 6,4% disbanding periode yang sama tahun 2020 yang mencapai USD 2,21 miliar.
5. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari *Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing*, sejak Januari 2021 hingga saat ini, KKP telah menangkap 126 kapal ikan ilegal, dimana 42 kapal adalah kapal ikan asing.

c. Pertanyaan :

Untuk program yang refocusing kami tidak melihat keberpihakan KKP terhadap rakyat. Program yang tidak terkait dengan rakyat masih bertahan dan hanya mengganti nomenklatur. Misal program *shrimp estate*, Komisi IV tidak setuju dan nomenklatur diganti ke modeling kawasan budidaya udang, sedangkan hampir semua program – program di Dapil dihilangkan, mohon penjelasannya.

Tanggapan:

Mohon untuk meluruskan bahwa untuk refocusing dilakukan pada anggaran 2021, dimana program Shrimp Estate belum dilaksanakan. Karena program Shrimp Estate dilaksanakan pada tahun 2022.

Untuk refocusing anggaran dilakukan terhadap kelompok kegiatan pendukung operasional seperti pertemuan, rapat dan perjalanan dinas serta kegiatan yang tidak mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (non PEN). Proporsi anggaran PEN dan non PEN di Ditjen Perikanan Budidaya pada saat dilakukan refocusing adalah 75% PEN dan 25 % non PEN, sehingga anggaran non PEN yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi nilai refocusing yang di bebaskan kepada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 388 Milyar atau sekitar 33 persen dari anggaran DJPB yang sebesar Rp. 1.170 Milyar.

Sehingga refocusing juga bersumber dari anggaran PEN dengan tetap memperhatikan program bantuan ke masyarakat, seperti Bioflok, benih dan induk, serta pakan mandiri. Setelah refocusing, terjadi perubahan target bantuan untuk Bioflok, benih dan induk, serta pakan mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Bantuan	Semula	Menjadi	% Selisih
1.	Benih (ekor)	217 juta	169 juta	21 %
2.	Induk (ekor)	1,1 juta	865 ribu	21 %
3.	Pakan (ton)	1.500	985	34 %
4.	Bioflok (paket)	314	250	20 %

Namun dengan penurunan jumlah bantuan ini, untuk Bantuan Pemerintah Aspirasi tetap akan terpenuhi dan diselesaikan sampai dengan akhir tahun.

Untuk usulan dari masyarakat yang sdh masuk dan belum dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2021, akan menjadi prioritas pada penyaluran bantuan pemerintah pada tahun 2022.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

a. Pertanyaan :

Pada Tahun 2020 anggaran KKP mengalami refocusing sebesar kurang lebih 1,147 Triliun sedangkan untuk anggaran tahun 2021 sebanyak 1,4 T artinya tahun ini anggaran yang dipotong lebih besar dari tahun 2020.

- Kami sangat menyayangkan refocusing yang cukup besar di KKP mengingat performa sektor perikanan termasuk cukup kuat meskipun dalam masa pandemic. Selain itu sebenarnya anggaran KKP sudah sangat kecil dibandingkan kementerian dan yang lain.
- Karena adanya refocusing anggaran berarti akan ada beberapa kegiatan yang akan hilang ataupun dikurangi. Kami tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali dimana program-program yang sudah dijanjikan ke konstituen menjadi hilang akibat refocusing. Kami meminta KKP untuk mensosialisasikan kegiatan mana saja yang dikurangi atau ditiadakan.

Tanggapan :

Terima kasih atas respon perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap alokasi anggaran KKP, dimana kebijakan pemerintah berupa refocussing anggaran adalah untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian. *Refocusing* anggaran pada saat ini merupakan *Refocusing* tahap IV untuk memenuhi alokasi anggaran untuk program Vaksinasi Nasional, penanganan pandemi COVID-19 secara umum, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, KKP tetap berkomitmen tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui kegiatan-kegiatan KKP antara lain bantuan sarana prasarana produksi, peningkatan infrastruktur, pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan SDM, fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan.

b. Pertanyaan :

Menjelang kuartal III penyerapan anggaran KKP sudah mencapai rata-rata 64%, namun khusus untuk Ditjen perikanan budidaya penyerapannya masih 61% dan perikanan tangkap 55%. Belajar dari pengalaman tahun kemarin kedua Ditjen ini selalu dibawah rata-rata penyerapan anggarannya. Pertanyaannya ada permasalahan apa sehingga kedua ditjen ini masih kesulitan melakukan penyerapan anggaran?

Tanggapan :

Terima kasih atas respon dan catatan Bapak, dapat kami laporkan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selalu berupa melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan hasil yang dicapai dan penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan. Akan tetapi pada pelaksanaannya sampai saat ini beberapa hal menjadi kendala dan menyebabkan masih rendahnya penyerapan anggaran tahun 2021.

Salah satu kendala tersebut adalah pelaksanaan refocusing anggaran, disaat beberapa kegiatan sudah akan dieksekusi atau proses lelang. Sehingga penandatanganan kontrak beberapa kegiatan menunggu selesaikan dokumen anggaran yang memakan waktu kurang lebih 1,5 bulan. Hal lain adalah kondisi pandemic yang mengakibatkan diterapkannya PPKM mengakibatkan melambatnya mobilitas petugas dalam verifikasi CPCL dan distribusi bantuan menjadi terhambat, dan beberapa identifikasi dan verifikasi Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) memerlukan waktu dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah.

Dapat kami sampaikan pula bahwa serapan Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan 27 Agustus 2021 adalah 50,89% dan akan terus bertambah dengan terselesaikannya kegiatan kontraktual sampai dengan akhir tahun. Tidak ada permasalahan krusial, permasalahan-permasalahan teknis dalam tender dan koordinasi akan segera kami selesaikan sehingga serapan dapat dicapai dengan optimal.

c. Pertanyaan :

Tahun ini Ditjen Perikanan Budidaya mengalami refocusing anggaran cukup besar sekitar 39% dari 1,1 Triliun menjadi hanya 700 Miliar. padahal kalau melihat program kerja Menteri banyak fokus ke budidaya perikanan, artinya kebijakan refocusing ini kontra produktif dengan proker Menteri.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian anggota terhasap anggaran dan program kerja DJPB. Dengan kondisi anggaran yang ada, tentunya akan diikuti penyesuaian beberapa target output, namun DJPB tetap akan terus memenuhi beberapa target tersebut sampai akhir tahun.

d. Pertanyaan :

Kami mengapresiasi upaya kementerian untuk memperbaiki tata kelola benur lobster melalui PermenKP no 17 tahun 2021. Namun di lapangan gejolak masih terjadi karena para nelayan merasa kesulitan menerapkan permenKP tersebut karena nelayan penangkap benur sebelum menjual harus membesarkan dulu sampai ukuran 5 gram. Oleh karena itu Kami meminta KKP untuk memberikan pendampingan serta pembangunan sarana dan prasarana budidaya lobster khususnya pada daerah penghasil lobster untuk membantu nelayan membesarkan lobster sampai mencapai berat 5 gram sebelum dijual.

Tanggapan :

Terima kasih atas komentar dan saran yang Bapak sampaikan, sebagaimana filosofis utama tata kelola sumberdaya lobster yang baru melalui Permen KP No. 17 tahun 2021 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama seluruh stakeholder perlu mengembangkan kegiatan pembudidayaan lobster dengan melibatkan pembudidaya dalam negeri seluas-luasnya. Akan tetapi dalam jangka pendek memperhatikan ketersediaan sarana produksi serta tingkat penguasaan teknologi pendederan lobster untuk mencapai ukuran 5 gram, untuk sementara masih mengandalkan keberadaan UPT milik Ditjen Perikanan Budidaya. Dari uji coba dan kajian yang dilakukan UPT Ditjen Perikanan Budidaya selama pendederan benih bening lobster sampai berukuran 5 gram masih rentan sehingga tingkat kelangsungan hidup masih relatif rendah. Selanjutnya masyarakat pembudidaya dapat menggunakan benih ukuran lebih dari 5 gram yang diproduksi UPT untuk kegiatan pembesaran. Karena dari penelitian yang ada dan uji coba yang dilakukan pada ukuran tersebut lobster sudah mampu beradaptasi pada suasana wadah budidaya sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan lebih terkendali.

e. Pertanyaan :

Per tanggal 5 agustus KKP mengungkapkan bahwa telah menggagalkan 52 kasus penyelundupan benur lobster yang jumlah 3.873.775 ekor. Bagi kami penyelundupan ini terjadi karena masih ada upaya perburuan rente dari para pelaku yang mengejar nilai jual tinggi. Namun pemerintah juga selaku pembuat kebijakan perlu untuk segera merespon kejadian ini khususnya untuk membentuk sistem pasar harga benur yang rasional. Investasi dibudidaya lobster harus terus

digenjot agar mampu menyerap hasil tangkapan nelayan sebab jika tidak ada solusi maka penyelundupan benur akan terus berulang.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap solusi penyelundupan BBL, dimana KKP telah melakukan hal-hal antara lain:

1. Peningkatan sinergitas pengawasan dan penanganan kasus sudah terlaksana antara KKP dan POLRI
2. Peningkatan pengawasan, analisis dan mitigasi risiko di tempat-tempat rawan penyelundupan
3. Peningkatan kapasitas petugas PPNS KKP melalui pelatihan/bimtek
4. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku dan/atau oknum yang terlibat
5. Melakukan sosialisasi/bimtek untuk penyadartahuan masyarakat
6. Pembentukan kelembagaan satgas gabungan penanganan penyelundupan BBL
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana bersama aparat penegak hukum
8. Peningkatan koordinasi dan kerjasama teknis
9. Integrasi data dan informasi antara Instansi terkait

f. Pertanyaan :

Sama halnya dengan ditjen perikanan budidaya, ditjen peningkatan daya saing (PDS) juga mengalami refocusing anggaran mencapai 54%. Kami dari fraksi PKS merasa heran saja karena bagi kami peningkatan daya saing produk perikanan ini harus mendapatkan perhatian lebih dari kementerian. Catatan yang kami peroleh daya saing produk perikanan Indonesia masih relative lemah dibandingkan dengan di negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Tanggapan :

Kami sependapat dengan proporsionalitas refocusing anggaran agar terjalin kesimabungan antara program di hulu dengan hilir kelautan dan perikanan. Kami akan memperhatikan dan mengharapkan dukungan seluruh jajaran Komisi 4 DPR RI agar alokasi anggaran Ditjen PDS dapat ditingkatkan sehingga mampu hadir mendorong peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

g. Pertanyaan :

Pada kriteria teknis penilaian DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 pada point 5 disebutkan mengenai provinsi bercirikan kepulauan. Pada kesempatan ini kami menanyakan terkait dengan realisasi lumbung ikan nasional di Maluku yang akan dimulai dalam waktu dekat ini. kami minta kementerian harus mendorong adanya dasar hukum (peraturan presiden) terkait LIN sehingga kontinuitas LIN bisa terus terjaga meskipun pemerintahahn telah berganti.

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap dasar hukum Lumbung Ikan Nasional, KKP sependapat mengenai hal tersebut dan selanjutnya selanjutnya KKP akan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk

membahas dasar hukum dimaksud bersama Kemenko Marves, Kemenhub, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara.

h. Pertanyaan :

Pada perencanaan anggaran DAK KKP tahun 2021 terdapat program Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat: pembangunan gudang garam 1,000 ton, revitalisasi gudang garam rakyat < 100 ton, rumah tunnel garam, integrasi pergaraman 8-15 ha. Program inipun kembali masuk pada perencanaan tahun 2022. Pertanyaannya kementerian perlu menjelaskan sejauh mana program ini mendorong peningkatan produksi garam nasional khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada garam impor.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan masukan Komisi IV DPR RI. Usulan DAK tahun 2022 untuk pergaraman meliputi pengadaan sarana dan prasarana garam rakyat dengan skala yang lebih kecil dibandingkan APBN, seperti integrasi lahan garam 8-15 Ha, Pembangunan/ Revitalisasi Gudang Garam Rakyat <100 ton, dan rumah tunnel garam. Hal ini untuk memfasilitasi petambak garam yang karena kondisi lahannya tidak bisa memenuhi syarat sebagai penerima PUGaR regular. Tujuan penggunaan DAK sama dengan tujuan PUGaR yakni peningkatan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas garam rakyat.

11. Ibu Anggia Erma Rini, MKM (Fraksi PKB – Jawa Timur VI)

Pertanyaan :

Terkait target dan capaian harus ada analisa, evaluasi dan dicatat serta dinarasikan. Apakah ada temuan atau masalah dilapangan? Agar Komisi IV juga diberitahu hal tersebut

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian dan saran Ibu Anggia Erma Rini terhadap target dan capaian harus ada analisa, evaluasi dan dicatat serta dinarasikan. KKP sependapat dengan saran tersebut bahwa perlu ada monitoring dan evaluasi capaian, temuan/masalah di lapangan terhadap pengelolaan dan implementasi program dan kebijakan KKP untuk menyusun perencanaan dan meningkatkan kinerja di masa depan. Untuk itu KKP akan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pada Unit Kerja Eselon I dan juga memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KKP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

12. Bapak Ir. Moh. Ichsan Firdaus (Fraksi Partai Golongan Karya – Jabar V)

a. Pertanyaan :

Sehubungan dengan integrasi antara DAK dan pusat, ada beberapa kegiatan yang tidak perlu di programkan di anggaran pusat atau tumpang tindih. Ada usulan program tambahan penyediaan sarpras. Sepengetahuan kami misal:

TPI selalu ada di DAK. Pasar ikan modern dan higienis, kampung nelayan maju, rehab TPI, pabrik es kenapa itu tidak dialokasikan saja ke daerah. Agar bisa dilakukan penghematan untuk hal - hal yang produktif untuk dibelanjakan pusat.

Tanggapan :

Dalam rangka integrasi dan harmonisasi pembangunan KP pusat dan daerah, agar tidak tumpang tindih dan dapat saling memperkuat, Ditjen PDSPKP Menyusun rancangan kegiatan yang didanai melalui anggaran DAK dalam rangka rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan pemasaran Hasil KP, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kriteria teknis lainnya. Beberapa kegiatan DAK terkait dengan Rehabilitasi Sarpas Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan adalah:

- Rehabilitasi Pabrik ES
- Rehabilitasi Pasar Ikan
- Rehabilitasi ICS
- Rehabilitasi CS
- Rehabilitasi UPI
- Rehabilitasi Rumah Kemasan
- Rehabilitasi Sentra Pengolahan

Terima kasih atas masukan Bapak Ir. Moh. Ichsan Firdaus, hal ini akan menjadi perhatian kami dalam menyusun kegiatan dan anggaran baik yang akan dibiayai melalui APBN Pusat maupun DAK Provinsi/Kab/Kota.

b. Pertanyaan :

Pada DJPDS masih ada beberapa kegiatan yang kecil – kecil misal: peralatan pengolahan, peralatan pemasaran. Lebih baik berikan saja coolbox yang berguna untuk nelayan. Lebih baik fokus pada 1 kegiatan yang dampaknya cukup lumayan.

Tanggapan :

Ditjen PDS akan mempertimbangkan usulan dan masukan dari bapak Moch. Ichsan Firdaus untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang berdampak besar pada masyarakat. Kami juga berharap agar ada alokasi tambahan anggaran bagi Ditjen PDS untuk dapat mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dari sisi hilir termasuk juga memfasilitasi bantuan bagi masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya pengolah dan pemasar ikan.

13. Bapak Muslim, SHI, MM (Fraksi Demokrat – Aceh II)

a. Pertanyaan :

Mohon penjelasannya terkait dengan 32 nelayan Aceh yang sampai hari ini masih ditahan di Thailand dan sampai hari ini belum kembali. Mudah - mudahan dari KKP bisa koordinasi dengan Kemenlu.

Tanggapan :

Terhadap 32 Nelayan Aceh yang saat ini masih ditahan di Thailand, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa proses peradilan telah selesai dengan putusan sebagai berikut:

1. Nakhoda, dinyatakan bersalah, dan divonis denda 500 Ribu Baht (Kurs BI = Rp. 217.000.000), atau diganti hukuman badan tidak lebih dari 2 tahun;
2. 27 nelayan dewasa dinyatakan bersalah, dan divonis denda 300 rb Baht (Kurs BI = Rp. 130.200.000), atau diganti hukuman badan tidak lebih dari 2 tahun;
3. 4 nelayan di bawah umur diberikan masa percobaan 2 tahun dan akan dideportasi ke Indonesia dalam waktu dekat.

Terhadap putusan dimaksud, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut dalam rangka pemulangan 32 nelayan tersebut.

b. Pertanyaan :

Perihal ekspor, kami berharap KKP melakukan pendampingan untuk pengusaha di daerah agar ada peningkatan tiap tahun untuk melakukan ekspor. Contoh di Aceh hanya ada 1 perusahaan saja yang melakukan ekspor.

Tanggapan :

KKP melalui BKIPM memberikan fasilitasi berupa sosialisasi dalam kerangka klinik ekspor yang bekerja sama dengan Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPOM dan lainnya di daerah. Klinik ekspor ini akan melakukan pendampingan kepada calon eksportir untuk dapat melakukan ekspor, edukasi dan membantu secara administrasi kepada calon eksportir terutama UMKM dan IKM untuk melihat peluang dan mencari pasaran ke luar negeri, serta duduk bersama untuk mensinergikan dan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan ekspor perikanan di daerah. Disamping itu KKP juga berperan aktif dalam program *direct call*, agar hasil perikanan yang menjadi potensi unggulan daerah bisa diekspor secara langsung ke luar negeri tidak lagi atas nama daerah lain.

14. Bapak Dr. Hermanto, SE., M.M (Fraksi PKS – Sumbar I)

a. Pertanyaan :

Soal proyek – proyek yang mangkrak, bahwa kita lebih memprioritaskan mana proyek – proyek yang setengah jalan untuk diteruskan contoh: di Dharmasraya ada jenis bioflok besar sampai sekarang tidak jelas, padahal sudah dilalokasikan dengan anggaran yang besar.

Tanggapan :

Terima kasih atas komentar dan tanggapan yang bapak sampaikan. Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2021 di Dharmasraya Provinsi

Sumatera Barat adalah pembangunan *broodstock center* (BC). Untuk mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya perlu disediakan benih unggul. Benih unggul dapat diproduksi dari induk-induk unggul oleh unit perbenihan dan petugas teknis yang tersertifikasi. Dalam rangka perbanyakannya penyediaan dan distribusi induk unggul maka Ditjen Perikanan Budidaya membangun *broodstock center* untuk mendukung penyediaan benih bermutu pada sentra-sentra produksi perikanan budidaya.

Sampai saat ini, pembangunan BC di Dharmasraya proses penyediaan sarana dan prasarana, diantaranya adalah 24 unit kolam bundar berdiameter 4 meter yang akan difungsikan sebagai wadah pemeliharaan calon induk ikan nila. Minggu III bulan Agustus 2021 akan diselesaikan proses pemasangan *root blower* dan penyesuaian kapasitas suplai listrik, sehingga sarana tersebut minggu depan sudah dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

b. Pertanyaan :

Pembudidaya harus dilengkapi juga dengan keahlian membuat pakan. Sangat disayangkan pakan ikan yang disalurkan kepada pembudidaya tidak disesuaikan dengan ukuran benih yang ditebar. Mohon kedepannya agar ada penyesuaian untuk tingkatan besaran ikannya.

Tanggapan :

Terima kasih atas catatan dan saran yang bapak sampaikan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan menindaklanjuti setiap saran yang disampaikan stakeholder. Dan terus akan menyempurnakan penyaluran bantuan pemerintah sehingga semakin bermanfaat bagi penerima. Pada pelaksanaannya, Tim Ditjen Perikanan Budidaya yang bertugas mendistribusikan bantuan pemerintah seperti pakan ikan perlu lebih detail membahas spesifikasi dengan penerima, supaya sesuai dengan ukuran benih.

c. Pertanyaan :

Daya serap atau realisasi anggaran sampai dengan agustus baru 56,3% dan masih sisa 43% yang belum terealisasi. Artinya kita dikaitkan dengan konsen waktu, waktu tinggal 4 bulan lagi. Agar target – target yang sudah ditetapkan untuk direalisasikan sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor KP dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak Hermanto terhadap penyerapan realisasi anggaran KKP. Terhadap penyerapan anggaran tersebut langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target antara lain (1) mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa, (2) mempercepat proses identifikasi dan penetapan calon penerima dan calon lokasi bantuan, (3) memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional, relevan dan terjadwal, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun, (4) melakukan monitoring dan evaluasi progres penyelesaian kegiatan.

15. Bapak Haerudin, S.Ag, MH (Fraksi Partai Amanat Nasional – Jawa Barat XI)

Pertanyaan :

Kondisi Pandemi seperti ini mohon untuk dipahami bahwa seluruh program agar diberikan ruang yang banyak melibatkan rakyat, seperti halnya padat karya, selain itu dapat menjadi ruang pertahanan pangan kita

Tanggapan :

Terima kasih atas perhatian Bapak Haerudin, bahwa seluruh program agar diberikan ruang yang banyak melibatkan rakyat seperti halnya padat karya. KKP sependapat dan mendukung yang menjadi perhatian tersebut. Untuk itu dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat KP tahun 2021 melalui padat karya dan penguatan pangan sebesar Rp. 1,08 triliun terdiri dari (1) Program PEN - Ketahanan Pangan sebesar Rp. 891,87 miliar antara lain bantuan kapal, alat tangkap, bantuan sarana budidaya perikanan, chest freezer gudang beku, pasar ikan, sentra kuliner, sarana niaga garam, sarpras wisata bahari, bantuan konservasi, pelatihan masyarakat, bulan mutu karantina). (2) Program PEN - Padat Karya sebesar Rp. 190,26 miliar antara lain kegiatan Minapadi, kluster tambak udang, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif/PITAP, rehabilitasi mangrove, integrasi lahan garam, penanaman vegetasi pantai.

16. Bapak Ir. Mindo Sianipar (Fraksi PDIP – Jawa Timur VIII)

Pertanyaan :

Permasalahan garam, kita memiliki panjang pantai terbesar kedua didunia kenapa tidak bisa mensuplai kebutuhan secara nasional, setelah saya pelajari dari panjang tersebut tidak sampai 10% yang air lautnya bisa digunakan untuk menghasilkan garam. Kebiasaan petambak garam pun harus dirubah, teknologinya harus dirubah, harus ada diseminasi teknologi kepada mereka. Kita arahkan industrinya ke UMKM dan koperasi badan hukumnya, teknologinya kearah sanalah yang dilakkan dan itu sudah ada di Indonesia dan hasilnya sangat memuaskan memenuhi standar industri baik untuk konsumsi maupun bahan baku garam farmasi. Agar ada kerjasama yang baik antara KKP, Kemenkop, Kemendagri karena salah satu konsumen terbesar adalah pemda – pemda.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan masukan Komisi IV DPR RI. Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengajukan izin prakarsa Penyusunan Perpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang akan menjadi acuan kebijakan integrasi seluruh K/L dan Pemda terkait dalam pembangunan pergaraman dari praproduksi sampai pemasaran, baik melalui kebijakan program/kegiatan maupun kebijakan pengaturan pergaraman yang ditujukan

terutama untuk melindungi kepentingan petambak garam rakyat dan untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Permasalahan garam yang utama terkait dengan produksi/produktivitas, mutu, dan tata niaga garam. Untuk meningkatkan produksi garam, luas lahan produksi garam yang saat ini sekitar 20.000 Ha dapat ditingkatkan hingga lebih dari 30.000 Ha. Begitu juga dengan teknologi produksi, yang saat ini mayoritas hanya mengandalkan cuaca/musim (4-5 bulan/tahun), dapat ditingkatkan dengan teknologi produksi yang tidak tergantung dengan musim.

Mutu garam rakyat yang mayoritas masih rendah (KW2 dan KW3) menjadikan sulit untuk memenuhi standar garam industri dan bersaing dengan garam impor. Namun sebagian besar garam rakyat sebenarnya telah memenuhi syarat untuk bahan baku garam konsumsi dengan kadar NaCl 83-94%. Untuk meningkatkan mutu garam rakyat perlu dilakukan upaya perbaikan teknologi produksi agar memenuhi syarat garam KW1 dan garam industri. Selain pengawalan dan pembinaan dalam proses produksi garam yang baik, kelompok petambak garam (UMKM) perlu dibantu sarpras unit pengolahan garam untuk meningkatkan mutu garamnya, misalnya unit washing plant.

Tata niaga garam juga perlu diperbaiki sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang sangat signifikan, khususnya harga yang sangat rendah pada musim panen raya. Hal ini menyebabkan terjadi penumpukan garam yang terlalu lama, karena menunggu harga yang lebih baik, sehingga dapat menurunkan mutunya. Oleh karena itu perlu dibangun unit-unit penyangga (gudang garam yang dilengkapi unit washing plant) yang cukup pada sentra produksi garam guna menampung garam rakyat yang tidak terserap pasar. Kebijakan impor juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengganggu tata niaga garam dalam negeri, khususnya terkait yang mutunya telah memenuhi syarat untuk bahan baku garam konsumsi.

Inovasi teknologi sudah diterapkan mulai dari proses produksi maupun ada proses pengolahan. Pada proses produksi, pada kenyataannya petani mampu menghasilkan garam dengan kualitas baik apabila menerapkan SOP proses produksi garam yang baik dan diikuti dengan harga jual yang bagus pula. Namun apabila harga garam rendah, petambak cenderung memproduksi garam dengan kualitas rendah. Kualitas garam sangat tergantung dari lama masa panen. Dalam hal ini BRSDM telah memberikan panduan bagaimana produksi garam yang berkualitas bagus.

Untuk kebutuhan konsumsi, Indonesia bisa dikatakan swasembada garam. Namun untuk kebutuhan industri khususnya aneka pangan, harusnya juga dipenuhi dari produksi lokal dengan mengolah garam local menjadi garam industri, sedangkan untuk keperluan CAP sepenuhnya masih diperlukan impor.

Untuk menghasilkan garam untuk bahan baku industri, perlu inovasi teknologi pengolahan garam untuk memperoleh nilai tambah produk bagi petambak dan pengolah garam. BRSDMKP telah melakukan riset dan inovasi teknologi pengolahan garam melalui 2 proses yaitu pencucian (washing) dan rekristalisasi (refinery) untuk menghasilkan produk garam standar industri dengan kadar NaCl diatas 98%.

Khusus terkait dengan pengolahan garam ini KKP tidak dapat bekerja sendirian, karena untuk pengolahan garam baik untuk konsumsi maupun untuk bahan baku industri harus memenuhi berbagai peraturan dan standar baku yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pendampingan pengolahan garam yang telah dilakukan oleh BRSDMKP, beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat dan berpotensi untuk menjadikan usaha pengolahan garam gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan antara lain:

- Aspek legalitas dalam pengolahan garam, terdiri dari SNI, BPOM, Halal MUI, Merek Dagang, hal ini perlu kerjasama dengan semua institusi yang menerbitkan ijin pengolahan dan penetapan standar baku mutu.
- Dukungan bagi UMKM untuk pemenuhan SNI, Untuk mendapatkan SNI diperlukan pra kondisi pabrik yang baik, seperti kondisi abrik harus plester atau keramik, hiegenitas antara proses produksi dan pengemasan, perijinan usaha, IMB, Ijin gangguan lingkungan. Beberapa aspek ini sulit untuk dapaat dipenuhi oleh penerima yang memiliki modal tipis.
- Dukungan modal, permodalan menjadi aspek yanaga penting dalam bisnis garam. Penerima dengan modal tipis akan kesulitan untuk dapat mengopersionalkan paket teknologi yang diterima dengan optimal.
- Peluang pasar, Beberapa penerima belum berpengalaman dalam memasarkan garam olahan, perlu pendampingan bisnis dan membuka jaringan agar garam yang diproduksi dapat diserap oleh pasar. Untuk mengenalkan merk yang baru membutuhkan upaya yang lebih.

17. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si (Fraksi PDIP – Jawa Barat IX)

a. Pertanyaan :

Mohon KKP agar sungguh – sungguh menangani permasalahan dimana predikat yang diperoleh semula WTP menjadi WDP. Sungguh sangat memperhatikan. Adapun penyebab karena terkait kebijakan ekspor BBL yang dilaksanakan sebelum ditetapkan kebijakan PNBP sehingga negara kehilangan peluang untuk memperoleh PNBP dari ekspor tersebut. Yang kedia karena lemahnya sistem pengendalian interna terkait pengelolaan BLU LPMUKP, tidak tertibnya aliran kas, pengeluaran dan pendapatan. Apabila tidak diperbaiki dengan baik akan menimbulkan kerugian negara kedepan.

Tanggapan:

Kami sependapat dengan masih lemahnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan kas serta pengelolaan pendapatan dan belanja. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya ketersediaan sumber daya manusia BLU LPMUKP khususnya pada pengelola keuangan. Kebutuhan SDM ini telah dipenuhi pada awal 2021 yang kami harapkan dapat terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan BLU LPMUKP.

Selain itu, temuan BPK juga telah kami tindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pengaturan terkait kebijakan akuntansi, pengelolaan kas serta pengelolaan pendapatan dan belanja. Melalui upaya perbaikan yang dilakukan, kami berharap ke depannya sistem pengendalian internal BLU LPMUKP dapat lebih andal.

b. Pertanyaan :

Tahun 2021 KKP menganggarkan PNBP dari BLU 54 M lebih, mohon agar kami diberikan data. Seharusnya posisi pinjaman BLU di awal tahun 2021 1.8 T, berapa posisi BLU di awal tahun dan berapa targetnya sampai dengan akhir tahun 2021? karena ini juga akan mempengaruhi ketidakcapaian anggaran 2021.

Tanggapan :

Secara umum, LPMUKP mengelola dua jenis anggaran yaitu dana kelolaan untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan, serta dana operasional yang berasal dari PNBP BLU LPMUKP. Sejak 2020, LPMUKP secara mandiri hanya dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari PNBP.

Dana kelolaan LPMUKP berjumlah Rp.1,35 Triliun. Pada akhir 2020, telah disalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp.602 Miliar. Pada Tahun 2021, LPMUKP ditargetkan menyalurkan sebesar Rp.600 Miliar tambahan pinjaman/pembiayaan baru. Oleh karena itu, target penyaluran hingga akhir 2021 sebesar Rp.1.202 Miliar. Hingga Semester I Tahun 2021, LPMUKP telah menyetujui dan mencairkan pinjaman sebesar Rp.267 Miliar pinjaman baru atau setara dengan Rp.869 Miliar secara kumulatif. Pencairan dan persetujuan pinjaman sebesar Rp.267 Miliar setara dengan 44% dari target penyaluran di tahun 2021.

Anggaran operasional BLU LPMUKP pada Tahun 2021 sebesar Rp.54 Miliar yang Sebagian besar diperuntukkan untuk operasional rutin LPMUKP termasuk belanja pegawai. Alokasi belanja pegawai BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.36 Miliar atau sebesar 66% dari anggaran operasional. Kami akan terus mengejar penyerapan belanja operasional LPMUKP untuk pencapaian target penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir.

c. Pertanyaan :

Terkait dengan usulan tambahan anggaran 8 T, saya mengkaji dari komposisi penganggaran di tahun 2021 dari total anggaran 4.74 T anggaran pengelolaan perikanan 1.29 T dukungan manajemen 2.965 T. TA 2020 dari 6.1 T untuk pengelolaan perikanan dan kelautan 2.21 T, dukungan manajemen 3.39 T. dr 3.39 T seharusnya di tempati anggran belanja pegawai 1.8 T, operasi pegawai 0.78 T. Ini sesungguhnya tidak sejalan dengan arahan anggaran 2022 adalah untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dilaksanakan oleh kementerian dan kelembagaan mohon untuk dikaji kembali.

Tanggapan :

Terima kasih atas evaluasi dari Bapak Sutrisno. KKP akan berusaha menjaga proporsionalitas dari rancangan anggaran tahun 2022. Masukan Bapak akan menjadi perhatian kami terutama melihat kembali kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi.

d. Pertanyaan :

Bagaimana agar pagu indikatif dimaksimalkan untuk rakyat sektor KP, oleh karena itu perlu ada inventarisasi mana anggaran yang dialihkan untuk DAK sehingga bisa maksimal digunakan untuk kebutuhan masyarakat sektor KP.

Tanggapan :

Terima kasih atas usulan dari Bapak Sutrisno terhadap anggaran yang dialihkan untuk DAK KP untuk digunakan kebutuhan masyarakat sektor KP. Diharapkan melalui DAK KP dapat mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK KP dikelompokkan menjadi dua, yaitu DAK KP untuk Provinsi dan DAK KP untuk Kabupaten/Kota. Terkait dengan DAK KP terdapat kriteria teknis penilaian DAK bagi provinsi antara lain (1) sentra produksi kelautan dan perikanan, (2) pelabuhan perikanan yang masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) dan status P3D, (3) status penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, (4) tingkat kerawanan *IUU Fishing*, (5) provinsi bercirikan kepulauan, (6) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dan (7) lokasi *Major Project* RPJMN 2020-2024. Sedangkan kriteria teknis untuk kabupaten/kota antara lain (1) sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya serta produksi olahan perikanan, (2) jumlah nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan (3) sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Adapun menu DAK provinsi bidang KP Tahun 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi, pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan serta sarana dan prasarana pergaraman. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota adalah pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan, sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil, sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

18. Bapak Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si (Fraksi Partai Nasdem – Maluku)

Pertanyaan :

Di Maluku ada BPPP membawahi 3 provinsi Maluku, Maluku Tengah dan Papua. Apakah BPPP di Maluku bukan saja sebagai badan pelatihan dan penyuluhan tetapi bisa juga sebagai balai benih agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Tanggapan :

Terima kasih atas saran dan arahan yang bapak sampaikan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan berkoordinasi dengan BRSDMKP dalam rangka

mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana BPPP Maluku untuk produksi benih bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan akan benih bagi masyarakat pembudidaya ikan merupakan kewenangan dari DJPB melalui UPT-UPTnya di daerah, salah satunya adalah Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon. Namun demikian BPPP Ambon siap mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan benih (udang vaname dan benih ikan air tawar) bagi masyarakat di wilayah kerja BPPP Ambon, melalui kegiatan pelatihan bagi pembenih ikan/pemilik *hatchery*. Dalam memberikan pelatihan ini, tentunya diharapkan mendapat dukungan pemenuhan standar sarana dan prasarana *hatchery* dalam rangka penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan/atau CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

Tanggapan atas pertanyaan pada Pengantar Pimpinan Rapat :

1. Terdapat 199 kota pesisir di Indonesia bakal terkena banjir rob tahunan pada 2050, dimana sekitar 118.000 hektar wilayah akan terendam air laut dan ada 8,6 juta warga terkena dampak yang diperkirakan mencapai kerugian sebesar Rp 1.576 triliun (kompas). Bagaimanaantisipasi dan rencana aksi KKP menjawab isu tersebut?

Tanggapan :

Bencana pesisir (antara lain kenaikan muka air laut, penggenangan, erosi, penurunan muka tanah) sulit untuk dihindari **namun dapat diminimalisasi dampaknya untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian ekonomi.**

Upaya yang dilakukan dapat berupa kegiatan struktur/fisik maupun non struktur/fisik maupun kombinasi dari keduanya. Khusus untuk bencana di wilayah pesisir, dapat menggunakan rekomendasi kegiatan yang tercantum pada PP Nomor 64 tahun 2010 tentang Mitigasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan modifikasi dari berbagai sumber.

	Struktur/Fisik	Non Struktur/ Non Fisik
<i>Proteksi</i>	a) pembangunan bangunan pelindung pantai (mis: <i>seawall, dyke, groin</i> dll) b) peremajaan pantai (<i>beach nourishment</i>) c) penanaman vegetasi pantai (mis: Cemara, Ketapang, Waru, Butun dll)	a) penyusunan tata ruang b) penyusunan zonasi c) pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat
<i>Adaptasi</i>	a) penyediaan sistem peringatan dini (cat: penerusan informasi BMKG ke <i>stakeholder</i> KKP) b) penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut/banjir (mis: rumah panggung) c) pembangunan bangunan pengendalian banjir (mis: polder) dan penyediaan pompa air d) pengelolaan ekosistem pesisir	

	e) Pengurangan/penghentian pengambilan air tanah	
<i>Relokasi</i>	a) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi b) Pemindahan permukiman penduduk dan aset strategis lainnya	

2. Tiga belas warga Indonesia menjadi Anak Buah Kapal (ABK) ikan China telah terdampar di perairan Somalia sekitar delapan bulan, dimana kapalnya terisolir atau jauh dari ibukota Mogadishu. Sejauhmana tingkat koordinasi dan kerjasamanya dengan instansi terkait dan lembaga internasional dalam upaya penyelamatan ABK?

Tanggapan :

Berdasarkan informasi dari Kemenlu, ABK WNI yang saat ini terdampar di Somalia, bekerja pada Liao Dong Yu, perusahaan kapal ikan Cina yang dengan durasi kontrak untuk satu tahun (Desember 2019 hingga Desember 2020). Jumlah ABK WNI sebanyak 13, yang direkrut dan diberangkatkan oleh PT Raja Crew Atlantik (RCA). Hasil penelusuran oleh Kemenlu pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan, PT RCA ini tidak tercatat sebagai perusahaan yang memiliki izin untuk merekrut dan menempatkan ABK WNI untuk bekerja di kapal ikan berbendera asing melalui skema P to P (*private to private*), sehingga kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tersebut (bahkan tidak dapat dihubungi). Kemenlu, melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia sedang menangani kasus ini:

- bekerja sama dengan KBRI di Nairobi, KBRI di Beijing, dan Kedubes RRT di Jakarta
- saat ini sedang proses pemulangan (pi=hak perusahaan/pemilik kapal sudah mengumpulkan para ABK WNI tersebut di satu kapal, di dekat pesisir pantai Somalia)

Peran dan posisi KKP dalam tata kelola perekrutan dan penempatan ABK WNI untuk bekerja di kapal ikan berbendera asing, dalam konteks hanya mendukung K/L terkait (Kemenhub, Kemenaker, Kemenlu, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI)

3. Reforma agraria di pulau-pulau kecil dan pesisir. Bagaimana solusi perlindungan hak terhadap masyarakat, khususnya pelaku utama KP, yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan pengolah ikan untuk memiliki sertifikat tanah yang legal?

Tanggapan :

Reforma agraria merupakan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dimana peran KKP adalah melakukan pendataan dan memastikan kesesuaian ruang di RTRW.

Kementerian Kelautan dan perikanan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN melalui program reforma agraria ATR BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Kegiatan ini dapat dilakukan pada wilayah wilayah yang memiliki nilai strategis. ATR BPN telah melakukan program reforma agraria di pulau pulau kecil seperti di Rajaampat dengan memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat di pulau pulau kecil di raja ampat.

Untuk kepentingan Pemukiman Nelayan, Lokasi Budidaya ikan, petambak garam dan pengolah ikan dapat disinkronkan dengan program Kampung Nelayan Maju (KALAJU).

Reforma agraria di Masyarakat Hukum Adat, Kementerian ATR/BPN sangat mendukung untuk melakukan sertifikasi komunal pada daerah Kelola masyarakat Hukum Adat.

Kedepannya, akan dilakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian ATR BPN untuk melaksanakan program reforma Agraria terhadap lahan masyarakat Pesisir dan pulau, pulau kecil, lahan petambak garam, pembudidaya ikan dan pengolah ikan.

4. Terdapat anggapan di sebagian masyarakat yang menilai bahwa kegiatan Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah "Proyek Elit Politik yang tidak bermanfaat bagi nelayan Maluku". Bagaimana upaya KKP menjawab anggapan tersebut dan sejauhmana upaya KKP dalam melibatkan pelaku utama KP berperan aktif dalam proyek M-LIN?

Tanggapan :

KKP telah melakukan kerjasama dengan Kemenhub untuk membangun Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi di Ambon tanggal 28 Juni 2021 dengan skema KPBU. Ditargetkan produksi perikanan dari 715 dan 718 dapat didaratkan di Ambon New Port dengan potensi produksi 1,1 juta/tahun dengan nilai Rp. 30,83 triliun/tahun. Ditargetkan terjadi rantai suplai produk perikanan di MLIN mulai dari pembongkaran hasil perikanan tangkap di pelabuhan, pelalangan ikan dan industri pengolahan ikan, dan kuliner.

5. Masih maraknya konflik nelayan andon di beberapa daerah dan kendala perijinan kapal perikanan di atas 30 GT, serta pemanfaatan sumber daya ikan di Zona ekonomi Eksklusif (ZEE). Sejauhmana tingkat fasilitasi KKP dalam meredakan konflik nelayan andon, kemudian sejauhmana KKP memberikan kemudahan ijin kapal perikanan di atas 30 GT untuk didorong melakukan penangkapan ikan di ZEE dalam rangka kebangkitan kelautan perikanan Indonesia?

Tanggapan :

Dalam rangka memberikan kemudahan ijin kapal perikanan di atas 30 GT KKP telah memiliki **Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)**. Melalui sistem ini pelaku usaha dapat mengajukan permohonan selama 24 jam dan KKP juga membuka loket penerimaan dokumen secara online selama 24 jam dan prosesnya pada hari kerja.

Untuk mendorong kebangkitan kelautan perikanan Indonesia KKP akan menerapkan **kebijakan penangkapan terukur** yang merupakan **model**

implementasi Ekonomi Biru yang ditargetkan mampu menciptakan distribusi pertumbuhan di wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini juga akan mendorong pengelolaan yang lebih tertata untuk kesehatan laut.

Kebijakan Penangkapan Terukur di setiap WPP dibuat agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat mengukur (1) angka produksi dan batasan penangkapan yang menunjukkan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan; (2) nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi; dan (3) nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

KKP telah menerbitkan Permen KP No. 18 tentang Penempatan entang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Peraturan ini menjadi rujukan pengaturan teknis andon penangkapan ikan untuk pemerintah daerah.

Dengan adanya pengaturan teknis andon penangkapan ikan, diharapkan kedepan dapat terjalin hubungan yang harmonis antar pemerintah daerah dan antar nelayan andon dan nelayan lokal, karena Andon Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar gubernur dengan memuat unsur perikanan dan/atau kelautan.

Mekanismenya harus didahului dengan Kesepakatan Bersama antar Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan oleh Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk, kemudian Provinsi tujuan andon memberikan persetujuan penerbitan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang akan diterbitkan oleh Provinsi Asal.

Dalam hal ini, KKP akan memfasilitasi Kesepakatan Bersama antar Gubernur dan Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan oleh Kepala Dinas terkait.

USULAN DAPIL JAWA BARAT III (KOTA BOGOR & KABUPATEN CIANJUR) KEBUTUHAN PROGRAM PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
1	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Legalitas Tanah di Desa Tanjung Sari Kecamatan Agrabinta Desa Tanjung Sari dengan Jumlah Penduduk Desa Sekitar 4.000 Jiwa dengan Total Luas Lahan sekitar 1.667.74 Hektar, yang terdiri dari 150 Hektar Milik Masyarakat, 350 Hektar Milik TNI AD, 820 Hektar Lahan Perkebunan, dan 347,74 Hektar Lahan Milik Masyarakat akan tetapi diklaim status tanahnya sebagai tanah milik TNI AD 	<ul style="list-style-type: none"> Legalitas Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Agrabinta Desa Tanjung Sari 	Terima kasih atas masukan usulan terkait hal ini, akan menjadi perhatian kami ke depan.
		<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata tingkat kecelakaan yang menyebabkan kematian nelayan desa Tanjung Sari kurang lebih 1-2 orang/bulan akibat tenggelam dilaut karena hempasan ombak pesisir pantai. Hal ini dikarenakan tidak ada Breakwater dan dermaga tempat penyimpanan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Breakwater Pembuatan dermaga penyimpanan perahu nelayan (Pelabuhan) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Agrabinta Desa Tanjung Sari 	

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Fasilitas kendaraan operasional untuk penyuluh perikanan non-PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Kendaraan roda 2 untuk penyuluh perikanan non-PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur 	<p>Fasilitas operasional untuk para penyuluh perikanan non PNS akan terus ditingkatkan sepanjang didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. BRSDM berencana mengusulkan pengadaan kendaraan operasional roda dua untuk dipinjam-pakaikan kepada para penyuluh non PNS di tahun 2023. suhar</p>
2	<p>Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan Melalui Kegiatan pelatihan perlu didukung anggaran yang memadai. Serta pembentukan kampung kampung perikanan sesuai dengan potensi wilayah, dari hulu sampai hilir (pemasaran) 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan anggaran dan kuota bimbingan teknis Kampung ikan hias Kampung pengolahan ikan Kampung pembuat pakan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Kabupaten Cianjur 	<p>BRSDM berkomitmen untuk terus meningkatkan program pelatihan masyarakat KP serta pendampingan tenaga penyuluh kepada pelaku utama/pelaku usaha termasuk kampung budidaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puslatluh KP akan terus berkoordinasi dengan Unit Riset BRSDM untuk mendapatkan inovasi dan teknologi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan modul dan kurikulum pelatihan dan materi penyuluhan. Metode pelatihan yang dilakukan melalui tiga metode yaitu, tatap muka, <i>blended training</i></p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					<p>dan <i>full online training</i>. Dari target 15.000 orang yang dilatih tahun 2021, jenis pelatihan yang diadakan meliputi penangkapan (nelayan), pembudi daya, pengolahan produk perikanan, permesinan dan tambak garam. Sebelum pelatihan dilaksanakan dan dilakukan penetapan kampung budidaya, terlebih dahulu dilakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) serta penyesuaian kegiatan dengan potensi/kebutuhan wilayah pelatihan/kampung budidaya.</p>
3	<p>Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Pendapatan pada produk olahan perikanan dikarenakan pengemasan produksi olahan masih dilakukan secara manual, sehingga produk tersebut tidak dapat bertahan lama, mudah basi dan kualitas menurun, kemasan produk kurang menarik dan belum ada merk/brand 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan paket pengolahan dan tambahan kuota bantuan paket pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cidaun 	<p>Dalam rancangan Kerja tahun 2022, kami mengusulkan kegiatan Sarana Pengolahan Ikan dan Chest Freezer, kami berharap kelompok dapat mengusulkan Bantuan tersebut dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Kualitas ikan segar dikarenakan kurangnya fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Chest Freezer 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Agrabinta 	

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
		<p>penyimpanan ikan segar yang kurang memadai</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cidaun 	
4	<p>Ditjen Perikanan Budidaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan kramba jarring apung di Waduk Cirata dikarenakan program Citarum Harum, sehingga para pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung harus memulai usaha perikanan di darat dari awal. Hal ini menimbulkan kekurangan stok ikan nila di pasar tradisional maupun pasar modern di wilayah Cianjur dan Kota Bogor • Data yang sudah diinput di aplikasi tebar budidaya agar bantuan segera direalisasikan ke kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bioflok ikan nila • Penambahan kuota bantuan bioflok ikan nila 	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Kabupaten Cianjur 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen perikanan budidaya akan berkoordinasi dengan dinas perikanan Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan kebutuhan spesifik jenis ikan dan volume untuk konsumsi masyarakat serta potensi pengembangan perikanan budidaya untuk memproduksinya. • Proses penyaluran bioflok usulan pembudidaya yang disampaikan melalui Ibu saat ini sedang verifikasi hasil CP/CL oleh Tim BBPBAT Sukabumi, tahapan selanjutnya penetapan penerima dan proses lelang dilaksanakan secara serentak.
5	<p>Ditjen Pengelolaan Ruang Laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dermaga Kapal Nelayan di Pelabuhan Jayanti sudah melebihi kapasitas sehingga perahu tidak dapat berlabuh dengan baik menyebabkan perahu nelayan cepat rusak jika musim angin dan ombak besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan perluasan dermaga Pelabuhan Jayanti atau membuka Pelabuhan nelayan yang baru pada muara sungai terdekat dari Pelabuhan Jayanti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cidaun Pelabuhan Jayanti 	<p>Terkait pengelolaan jenis ikan, dalam hal ini penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dan diusulkan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Provinsi</p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
			Kemungkinan besar adalah muara sungai yang berada di Cagar Alam Jayanti, namun perlu dikomunikasikan dengan KLHK		
		<ul style="list-style-type: none"> Pada Pesisir Pantai Kecamatan Agrabinta dan Kecamatan Cidaun terdapat 1-2 ekor penyu betina yang bertelur dengan jumlah telur berkisaran 100-200 butir. Seiring berjalannya waktu semakin berkurang karena belum ada upaya untuk melestarikan penyu tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pembuatan areal konservasi penangkaran penyu 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Cidaun Pelabuhan Jayanti Agrabinta Kecamatan Cidaun 	<p>Dalam menu DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan, Ditjen PRL menyediakan rincian kegiatan Sarana pemeliharaan sementara biota langka pada Menu DAK Provinsi Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebutuhan Bantuan pembuatan area konservasi penangkaran penyu dapat diusulkan melalui menu DAK Provinsi dimaksud.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Kluster tambak udang di Kabupaten Cianjur Kecamatan Cidaun sudah berjalan. Akan tetapi hingga saat ini diwilayah Cianjur belum ada Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan balai pengembangan perikanan budidaya air payau dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Agrabinta 	<p>Untuk pembentukan Unit Pelaksana teknis Perikanan Budidaya Air Payau di wilayah Cianjur, akan menjadi masukan bagi kami dalam pengembangan ke</p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
		<p>pendukung pemerintah seperti balai budidaya air payau. Sehingga dapat di buat pengembangan balai budidaya air payau ini diharapkan untuk meningkatkan potensi sumber daya ikan dan mengembangkan teknologi perikanan budidaya air payau. Selain itu juga untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat pesisir wilayah Cianjur Selatan</p>	<p>masyarakat pesisir (BPPBAPPMP)</p>		<p>depan. dan Kami mohon dukungan dari Ibu Endang, dalam merealisasikan pembentukan UPT ini.</p>
6	<p>Ditjen Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nelayan mengalami kesulitan dalam menentukan fishing ground, karena belum memiliki fasilitas alat yang dapat mengetahui titik lokasi keberadaan ikan dengan tepat 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan alat Smart Fishing YOKUM VMA 200 unit dan bangunan tower pemancar sinyal GPS Smart Fishing YUKOM VMA 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Agrabinta Kecamatan Cidaun 	<p>Terkait dengan usulan pengadaan VMA dan bangunan tower pemancar sinyal, belum dapat diakomodir pada tahun 2021. Selain itu penyediaan tower bukan menjadi Tusi KKP melainkan menjadi kewajiban perusahaan penyedia layanan. Untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan fishing ground, KKP secara rutin mengeluarkan Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yang dapat diakses melalui</p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					https://kkp.go.id/kategori/164-Peta-Prakiraan-Daerah-Penangkapan-Ikan .
		<ul style="list-style-type: none"> Alat penangkapan para nelayan kurang mumpuni untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan alat penangkapan ikan yang tidak terealisasi di tahun 2020 sebanyak 45 CPCL segera direalisasikan di tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Agrabinta Kecamatan Cidaun 	Bantuan alat penangkapan ikan tahun 2021 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan tahun 2020 yang belum terealisasi berkenaan dengan gagal lelang tahun 2020. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, belum terdapat usulan lengkap yang disampaikan kepada Ditjen Perikanan Tangkap. Mohon kiranya usulan lengkap dapat disampaikan kepada kami.
		<ul style="list-style-type: none"> Nelayan Kesulitan unruk membeli perahu karena harganya cukup tinggi sekitar Rp. 30.000.000/unit, sehingga biaya nelayan yang tidak bisa pergi melaut. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Mesin perahu 15 PK 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Agrabinta Kecamatan Cidaun 	Pada tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022, belum terdapat pengadaan mesin kapal perikanan. Namun demikian, pada rencana DAK 2022 sudah terdapat menu pengadaan mesin kapal perikanan. Perlu dukungan Dinas KP setempat untuk pengusulan/ akses pada menu DAK dimaksud.
		<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 110 orang nelayan desa Karangwangi kecamatan Cidaun 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Kapal 3 GT 	<ul style="list-style-type: none"> Koperasi Cahya Tani Persada Desa 	Bantuan Kapal 3 GT dilaksanakan melalui menu Dana Alokasi khusus (DAK)

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
		<p>menangkap ikan menggunakan perahu yang terbuat dari ban bekas truk, sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi dalam terjadinya kecelakaan saat mencari ikan dilaut dan pendapatan nelayan dengan menggunakan perahu tersebut relatif kecil sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000/ bulan, karena aral penangkapan yang terbatas</p>		<p>Karangwangi Kecamatan Cidaun</p>	<p>Kabupaten/Kota. Perlu dukungan Dinas KP setempat untuk pengusulan/ akses pada menu DAK dimaksud.</p>
7	<p>Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan dan Syarat Syarat administrasi pengiriman ikan dalam negeri maupun luar negeri dibuat lebih efisien dan mudah di pahami 	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan Administrasi lebih efisien dan mudah di pahami 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Kabupaten Cianjur 	<p>Dalam menjalankan tugas fungsi dan tanggungjawabnya BKIPM didukung sumberdaya organisasi 4 Satker Pusat, 47 UPT dan 272 wlayah kerja yang tersebar di 150 bandara (36 Bandara Internasional), 141 Pelabuhan (88 Pelabuhan Internasional) di 34 Propinsi dan 122 Kabupaten/Kota. Wilayah Bogor merupakan salah satu sentra produksi budidaya ikan hias yang mencakup 607 Rumah Tangga Perikanan (RTP) bidang usaha. Produksi budidaya ikan hias Bogor</p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					<p>meningkat dari 242,52 juta ekor pada tahun 2015 menjadi 290,44 juta ekor pada tahun 2019. Di sisi lain, ekspor ikan hias dari perusahaan ekspor yang beroperasi di wilayah Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2018 – 2019, sehingga perlu adanya inovasi dan terobosan baru.</p> <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meluncurkan platform Layanan Resmi Sertifikasi Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) Berbasis Seluler (android). Melalui inovasi ini, pelayanan dapat diakses secara mudah dan cepat, serta mampu mengurangi biaya dan waktu. Layanan ini untuk mendorong UMKM terutama pembudidaya ikan hias dalam meningkatkan transaksi perdagangan di seluruh Indonesia. sejalan dengan perkembangan dan tuntutan</p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					<p>masyarakat atas layanan sertifikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan transaksi perdagangan melalui e-commerce atau marketplace</p> <p>Platform layanan ini dapat diakses melalui aplikasi berbasis seluler (android) dengan keluaran dokumen dan bar-code yang langsung terhubung (link) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) penanggung jawab di daerah tujuan.</p> <p>Untuk layanan perkarantinaan ikan untuk ekspor, impor dan antar area, telah diterapkan layanan digital seperti Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Ikan Online (PPK Online), HACCP Online, CKIB Online yang akan terus dikembangkan untuk lebih memudahkan pengguna jasa/stake holder mendapatkan pelayanan perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan.</p> <p>Diharapkan dengan adanya platform Layanan Perkarantinaan Ikan di Bogor, dapat dimanfaatkan secara</p>

NO	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					maksimal oleh pelaku usaha dan menjadi sarana yang mudah untuk promosi produk, penjualan, dan distribusi berbagai produk ikan hias tanpa mengesampingkan kewajiban pemeriksaan perkarantinaan, dapat diakses secara mudah dan cepat, serta dapat mereduksi biaya transportasi/waktu perjalanan pelaku usaha dalam memproses sertifikasi kesehatan ikan.

Kebutuhan Program Perikanan Kota Bogor

NO	DIREKTORAT JENDERAL	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
1	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan perlu didukung anggaran yang memadai. Serta pembentukan kampung kampung perikanan sesuai dengan potensi wilayah dari Hulu sampai Hilir (Pemasaran) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Anggaran dan Kuota Bimbingan teknis • Kampung Ikan Hias • Kampung Pengolahan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bogor 	<p>BRSDM berkomitmen untuk terus meningkatkan program pelatihan masyarakat KP serta pendampingan tenaga penyuluh kepada pelaku utama/pelaku usaha termasuk kampung budidaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puslatluh KP akan terus berkoordinasi dengan Unit Riset BRSDM untuk mendapatkan inovasi dan teknologi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan modul dan kurikulum pelatihan dan materi penyuluhan. Metode pelatihan yang dilakukan melalui tiga metode yaitu, tatap muka, <i>blended training</i> dan <i>full</i></p>

NO	DIREKTORAT JENDERAL	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					<p><i>online training</i>. Dari target 15.000 orang yang dilatih tahun 2021, jenis pelatihan yang diadakan meliputi penangkapan (nelayan), pembudi daya, pengolahan produk perikanan, permesinan dan tambak garam. Sebelum pelatihan dilaksanakan dan dilakukan penetapan kampung budidaya, terlebih dahulu dilakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) serta penyesuaian kegiatan dengan potensi/kebutuhan wilayah pelatihan/kampung budidaya.</p>
2	Ditjen Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat Pandemi Covid-19 Pendapatan ekonomi pembudidaya ikan menurun dikarenakan: stok benih yang terbatas dan harga benih yang tinggi. • Data yang sudah di input di aplikasi tebar budidaya agar bantuan segera di realisasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan benih ikan dan calon induk • Penambahan kuota benih ikan dan calon induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kota Bogor Timur • Kecamatan Kota Tanah Sereal 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terealisasi bantuan benih usulan pembudidaya yang disampaikan melalui Ibu sebanyak 1.052.437 ekor yang didistribusikan BLUPPB Karawang,

NO	DIREKTORAT JENDERAL	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					BBPBAT Sukabumi dan BBPBAP Jepara. <ul style="list-style-type: none"> • Telah terealisasi bantuan calon induk ikan usulan pembudidaya yang disampaikan melalui Ibu sebanyak 2.650 ekor yang didistribusikan BBPBAT Sukabumi.
		<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan ketersediaan ikan nilai di pasar pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Bogor, Hal ini mengakibatkan harga ikan nilai tinggi sehingga perlu penumbuhan kelompok budidaya ikan di daerah Kota Bogor. • Data yang sudah di input di aplikasi tebar budidaya agar bantuan segera di realisasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banatuan Bioflok ikan nila • Penambahan bantuan bioflok ikan nila 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Timur 	Proses penyaluran bioflok usulan pembudidaya yang disampaikan melalui Ibu saat ini sedang verifikasi hasil CP/CL oleh Tim BBPBAT Sukabumi, tahapan selanjutnya penetapan penerima dan proses lelang dilaksanakan secara serentak.
3	Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Perizinan dan syarat-syarat administrasi pengiriman ikan dalam negeri maupun luar negeri di buat lebih efisien dan mudah dipahami 	<ul style="list-style-type: none"> • Perizinan administrasi lebih efisien dan mudah dipahami 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bogor 	Persyaratan administrasi untuk pengiriman ikan sangatlah penting untuk menjaga dan melindungi ikan agar mendapatkan akses pasar baik didalam

NO	DIREKTORAT JENDERAL	PERMASALAHAN PADA PERIKANAN	KEBUTUHAN PROGRAM	LOKASI/ KELOMPOK USULAN	TANGGAPAN
					<p>negeri maupun ekspor.</p> <p>BKIPM sedang dan akan terus mengembangkan inovasi dalam penyederhanaan pelayanan sertifikasi secara <i>online</i> untuk lebih memudahkan layanan pengguna jasa di wilayah-wilayah yang belum ada petugas BKIPM, dan sistem ini menggandeng dan bekerja sama dengan <i>forwarder</i> atau agen jasa pengiriman barang.</p> <p>Saat ini pengembangan inovasi ini masih dalam uji coba dan hanya diperuntukan bagi komoditas ikan dengan kategori risiko rendah.</p>